

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah menyelenggarakan fungsinya dalam : (1) perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan produksi pangan; (2) perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan; (3) perumusan rencana dan pelaksanaan, pengkajian dan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; (4) penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan; (5) penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; dan (6) evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Mengacu visi, misi, arah, dan kebijakan BKP Kementerian Pertanian, disusun Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan: "menjadi institusi yang handal, inovatif dan aspiratif dalam menunjang terwujudnya kecukupan pangan". Untuk mencapai visi tersebut, disusun Misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan: (1) meningkatkan pengembangan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; (2) meningkatkan penyediaan dan penyebaran informasi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; dan (3) menyiapkan konsep perumusan kebijakan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.

Tahun 2014 merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sehingga walaupun visi dan misinya telah disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis; tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ini masih mengacu pada program dan kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun rencana kerja tahunan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014 dengan sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu : Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, yang diukur dengan indikator kinerja: (a) jumlah desa yang diberdayakan dalam Demapan (regular dan kawasan) sebanyak 798 desa; (b) analisis penanganan daerah/lokasi rawan

pangan, SKPG sebanyak 455 lokasi; (c) jumlah hasil penyusunan FSVA nasional sebanyak 15 laporan; (d) jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan sebanyak 36 laporan; dan (e) penguatan kapasitas aparat dan masyarakat sebanyak 7 Laporan.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dicapai melalui Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (b) mengembangkan kemampuan akses pangan secara sinergis dan partisipatif; dan (c) mencegah serta menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 77.427.000.000,-. Kemudian terjadi perubahan kebijakan pemanfaatan anggaran nasional untuk penghematan anggaran untuk dialihkan ke subsidi BBM, sehingga anggaran untuk kegiatan strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan menjadi Rp. 68.661.969.000,- atau dihemat 5,3 persen.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan TA. 2014 telah dialokasikan anggaran melalui Satker BKP Kementerian Pertanian untuk alokasi anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 4.059.723.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 6.524.534.285,- atau 92,42 persen. Kegiatan yang paling terbesar pada Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.864.738.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.610.170.975,-.

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan di daerah, pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.661.969.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 62.738.246.927,- atau 91,37 persen.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, laporan baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran, dan belum dapat menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini diakibatkan oleh sistem penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB	
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1 Rencana Strategis	4
1. Visi	4
2. Misi	4
3. Tujuan Strategis	4
4. Sasaran Strategis	5
5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	5
6. Program	8
7. Rencana Kinerja Tahun 2014	8
III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian kinerja	11
3.2. Realisasi Anggaran	19
3.3. Hasil Kinerja Tahun 2014	21
3.4 Capaian Kinerja Lainnya	69
IV Penutup	86
4.1 Kesimpulan	86
4.2. Saran	87

LAMPIRAN

88

Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon II Kementerian/Lembaga
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun Anggaran 2014	9
2	Revisi Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014	10
3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014	11
4	Perbandingan Target Serta Capaian Kinerja Tahun 2010-2014	13
5	Pemanfaatan Bansos Desa Kawasan Mandiri Pangan	25
6	Jumlah Populasi dan Jumlah Penggilingan Per Kabupaten	50
7	Hasil Verifikasi RUK LKD Naka Mura	72
8	Hasil Verifikasi RUK LKD Munthuk Lestari	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Gambar Rangkaian Kegiatan PPFS 2014 di Tiongkok	78

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan selama menjalankan tugas-tugas kedinasan dan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar prestasi yang telah dicapai.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja Pusat ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang telah dicapai dalam Tahun 2014. Terkait dengan hal itu diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja aparat.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas dimasa mendatang sangat diharapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Jakarta, Januari 2015

Kepala Pusat

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan



Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, M.St

NIP 19580216 198103 1001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon II pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Tugas Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan pemantauan dan pemantapan ketersediaan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu melaporkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemberi mandat dan publik) tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta tingkat capaian sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka disusun Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014 sebagai: (1) pertanggungjawaban Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun 2014; (2) untuk mengetahui tingkat pencapaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; (3) bahan untuk mengevaluasi kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014, termasuk permasalahan, penyelesaian permasalahan dan saran masukan serta perbaikan kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan di masa datang.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan pemantauan dan pemantapan ketersediaan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;
2. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi akses pangan dan;
3. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan didukung oleh tiga bidang, yaitu:

- 1) Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan terdiri dari Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan dan Subbidang Sumberdaya Pangan yang mempunyai tugas melakukan (a) penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi serta analisis ketersediaan pangan; (b) penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi sumberdaya pangan;
- 2) Bidang Akses Pangan terdiri dari Subbidang Analisis Akses Pangan dan Subbidang Pengembangan Akses Pangan yang mempunyai tugas melakukan (a) penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi analisis akses pangan; (b) penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pengembangan akses pangan;
- 3) Bidang Kerawanan Pangan terdiri dari Subbidang Analisis Kerawanan Pangan dan Subbidang Penanggulangan Kerawanan Pangan dengan tugas (a) melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi serta analisis kerawanan pangan, (b) melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kerawanan pangan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Tahun Anggaran 2014 telah berupaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya melalui dukungan sumberdaya manusia baik teknis maupun non teknis. Adapun dukungan sarana/prasarana lainnya berupa data/informasi, alat pengolah data/komputer, anggaran khususnya untuk melaksanakan pemantauan, pengkajian, dan perumusan kebijakan ketahanan pangan. Data pendukung yang terkait diantaranya adalah data statistik (penduduk, statistik pertanian, konsumsi/Susenag, status gizi, kemiskinan, industri, ekspor/impor, stok pangan, dan lain-lain) secara series, serta data primer dan sekunder dari instansi terkait yang ada di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2010 – 2014 edisi revisi. dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai berikut:

1. Visi

Mengacu visi, misi, arah, dan kebijakan Badan Ketahanan Pangan, maka Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2010-2014 “Responsif, aspiratif, inovatif, dan mampu memobilisasi sumberdaya dalam peningkatan ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan”.

2. Misi

Guna mencapai visi tersebut, disusun Misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagai berikut :

- a. Membangun koordinasi yang sinergi dan efektif melalui partisipasi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dalam upaya peningkatan ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Membangun partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan ketersediaan, akses dan penanggulangan kerawanan pangan;
- c. Menyiapkan analisis yang akurat dan bahan rumusan kebijakan yang tepat tentang ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;
- d. Membangun model-model pengembangan ketersediaan, akses dan penanggulangan kerawanan pangan secara partisipatif dan transparan.

3. Tujuan Strategis

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan strategis dari Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah :

- a. Melakukan pengkajian dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan pemantauan dan pemantapan ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan; dan
- c. Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya.

4. Sasaran Strategis

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014 yang hendak dicapai, yaitu :

- a. Tersedianya bahan kajian, rumusan, dan kebijakan ketersediaan, akses, dan penanganan rawan pangan;
- b. Tersedianya bahan pemantauan dan pemantapan ketersediaan, akses, dan penanganan kerawanan pangan;
- c. Terwujudnya masyarakat yang mampu mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasai.

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tersebut, ditempuh melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :

a. Strategi

Strategi yang akan ditempuh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2010 – 2014, yaitu :

- 1) Memobilisasi dan mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan (expertise) yang ada (birokrasi, masyarakat, dan pakar setempat);
- 2) Memobilisasi sumberdaya (alam, financial, sosial, dan teknologi), daerah dan masyarakat untuk pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- 3) Memanfaatkan bantuan teknis dari Negara-negara asing dan lembaga internasional untuk kepentingan pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan di Indonesia.

Implementasi dari strategi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2010–2014, dilaksanakan melalui :

- 1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
- 2) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP);
- 3) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA);
- 4) Pengembangan analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan;
- 5) Peningkatan kapasitas aparat;
- 6) Menggerakkan berbagai komponen masyarakat dan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat.

b. Kebijakan

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

- 1) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan;
- 2) Mengembangkan kemampuan akses pangan secara sinergis dan partisipatif; dan
- 3) Mencegah serta menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

6. Program

Program yang dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada tahun 2010–2014 sesuai dengan program Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran program Badan Ketahanan Pangan tersebut, sasaran program yang hendak dicapai oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah pengembangan model-model peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan. Hal ini dilakukan dengan menggerakkan berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan, dan mengelola aset setempat (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya fisik/teknologi, serta sumberdaya sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat, dengan kegiatan utama sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor, selama empat tahun secara berkesinambungan. Selain itu dilakukan juga upaya penyediaan protein hewani di tingkat kelompok dan pengembangan ketahanan pangan di wilayah kepulauan dan perbatasan;
- 2) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya bencana rawan pangan kronis dan transien. Penanganan kerawanan pangan kronis dilakukan dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, investigasi dan intervensi. Sedangkan untuk penanganan kerawanan pangan transien dilakukan melalui investigasi dan intervensi;
- 3) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA). Tujuan dari penyusunan FSVA adalah untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dan desa;
- 4) Analisis Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses Pangan, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan, antara lain melalui pemantauan ketersediaan pangan, sinkronisasi sub sektor dan lintas sektor, penyusunan NBM, penyusunan dan analisis sumberdaya pangan, monitoring dan analisis situasi akses pangan, pengembangan akses pangan, penyebarluasan informasi ketersediaan, kerawanan dan akses pangan;
- 5) Apresiasi Aparat Untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan, adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pemantauan produksi, penanggulangan rawan pangan, pengembangan akses pangan; bagi aparat di daerah dan pusat.

7. Rencana Kinerja Tahun 2014

Rencana kinerja pada tahun 2014 merupakan implementasi rencana jangka menengah yang dituangkan kedalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut :

a. Sasaran Kinerja Tahun 2014

Berdasarkan visi, misi dan tujuan strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014 yang masih mengacu pada Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2010-2014, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014 yang hendak dicapai, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Diberdayakannya Desa Mandiri Pangan (reguler dan kawasan) sebanyak 798 desa;
- 2) Terlaksananya analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG di 455 lokasi;
- 3) Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA Provinsi sebanyak 15 laporan;
- 4) Tersusunnya hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan sebanyak 36 laporan;
- 5) Tersusunnya laporan penguatan kapasitas aparat dan masyarakat sebanyak 7 laporan.

b. Penetapan Kinerja

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (regular dan kawasan) 2. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG 3. Jumlah hasil penyusunan FSVA Provinsi 4. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan 5. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat	800 Desa 455 lokasi 15 Laporan 36 Laporan 9 Laporan

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp . 77.427.000.000,00

Pada pertengahan tahun 2014, terjadi penghematan anggaran kementerian dan lembaga, dimana untuk Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mendapatkan potongan sebesar Rp. 8.765.031.000,00 atau 11,32 persen dari anggaran semula. Hal ini memberikan pengaruh pada perubahan arah kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, sehingga indikator kinerja pada Penetapan Kinerja (PK) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014 juga mengalami perubahan, sebagai berikut :

Tabel 2. Revisi Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (regular dan kawasan) 2. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG 3. Jumlah hasil penyusunan FSVA Provinsi 4. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan 5. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat	798 Desa 455 lokasi 15 Laporan 36 Laporan 7 Laporan

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp . 68.661.969.000,00

Perubahan tersebut terjadi pada indikator :

1. Jumlah desa mandiri pangan dimana target awalnya 800 desa berubah menjadi 798 desa. Perubahan tersebut didasarkan karena desa yang mendapatkan dana bansos tidak mampu memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman pelaksanaan kawasan desa mandiri pangan
2. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat dari 9 laporan menjadi 7 laporan karena terjadi perubahan pada kegiatan peningkatan kapasitas LKD Demapan dan peningkatan kapasitas petani. Pada awalnya terdapat kegiatan peningkatan kapasitas LKD Demapan dengan output 1 laporan, akan tetapi setelah penghematan anggaran kegiatan ini ditiadakan. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas petani pada awalnya memiliki output berjumlah 4 laporan, dan setelah penghematan anggaran kegiatan ini berkurang menjadi 3 laporan karena adanya pengurangan jumlah lokasi kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang digunakan pada tahun 2014 mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU dan PK, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Berdasarkan Indikator kinerja Utama Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah ditetapkan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2014 dilakukan dengan cara :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014

Capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dilihat dari realisasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun terhadap target yang telah disusun dalam penetapan kinerja (Renstra). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (reguler dan kawasan)	798 Desa	798 Desa	100
	2. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG (Lokasi)	455 lokasi	455 lokasi	100
	3. Jumlah hasil penyusunan FSVA Provinsi	15 Laporan	15 Laporan	100
	4. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan (Laporan)	36 Laporan	36 Laporan	100
	5. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat (Laporan)	7 Laporan	7 Laporan	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kelima target Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah terlaksana seluruhnya dengan capaian kinerja sebesar 100 persen untuk setiap target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dikatakan berhasil (capaian kinerja antara 80 hingga 100 %).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Penetapan indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 – 2014. Hal tersebut terkait dengan perubahan organisasi Badan Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mengalami perubahan struktur organisasi yaitu dari yang sebelumnya terdiri dari Bidang Ketersediaan Pangan, Bidang Kerawanan Pangan dan Bidang Cadangan Pangan menjadi Bidang Ketersediaan Pangan, Bidang Kerawanan Pangan dan Bidang Akses Pangan.

Capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan juga dapat dilihat dari realisasi kinerja selama lima tahun terakhir berdasarkan Rencana Strategis Jangka Menengah Tahun 2010-2014. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Perbandingan Target Serta Capaian Kinerja Tahun 2010-2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa yang memasuki tahap kemandirian :	354					100				
	a. Desa Mapan TA 2007	116					100				
	b. Desa Mapan TA 2006	238					100				
	2. Jumlah provinsi yang menyusun analisis ketersediaan pangan	33	33				100	100			

	3. Jumlah kelompok yang melaksanakan pengembangan lumbung pangan	288				95,83			
	4. Jumlah provinsi yang mengikuti sosialisasi dan apresiasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)		33				100		
	5. Laporan hasil kajian angka konsumsi dan cadangan beras nasional		1				100		
	6. Jumlah Provinsi yang melakukan analisis SKPG dan melakukan intervensi penanganan daerah rawan pangan		29				87,88		
	7. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan SKPG		230				57,50		
	8. Jumlah desa rawan pangan yang melaksanakan Demapan		2561				100		
	9. Jumlah model akses		2				100		

	pangan										
	10. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (reguler dan kawasan)			3.414	1.625	798			100	100	100
	11. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG (Lokasi)			444	455	455			100	100	100
	12. Jumlah hasil penyusunan FSVA Provinsi			100	1	15			100	100	100
	13. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan (Laporan)			34	36	36			100	100	100
	14. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat (Laporan)			132	8	7			100	100	100
2. Meningkatnya penanganan rawan pangan secara cepat dan tepat	1. Jumlah provinsi yang melaksanakan SKPG	33									

Berdasarkan tabel diatas walaupun realisasi kinerja mengalami perubahan satuan maupun jumlah target di setiap tahunnya, akan tetapi capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan setiap tahun menunjukkan 100 persen untuk masing-masing target. Adanya perubahan yang terjadi ditahun-tahun tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 setiap tahun mengalami penambahan lokasi Desa Mandiri Pangan dan diberikannya dana bansos untuk Desa baru, tetapi mulai tahun 2013 sampai dengan 2014 sudah tidak dialokasikan lagi dana Bansos sehingga tidak ada lagi penambahan lokasi Desa Mandiri Pangan, dan hanya dilakukan pembinaan di tingkat provinsi, kabupaten sampai dengan desa. Namun kegiatan Desa Mandiri Pangan diperluas pada kawasan Mandiri Pangan di daerah perbatasan, kepulauan dan Papua-Papua Barat di 109 kawasan Mandiri Pangan, pada 60 Kabupaten di 13 Provinsi, dan dialokasikan dana bansos.
- Kinerja untuk penyusunan FSVA dari tahun 2010 hingga tahun 2014 secara keseluruhan telah tercapai 100 persen. Perbedaan jumlah capaian kinerja pada setiap tahunnya disebabkan karena perbedaan output dan sasaran penyusunan FSVA.
 - Pada tahun 2010, penyusunan FSVA ditujukan pada tingkat provinsi, sehingga dihasilkan 14 laporan di tingkat provinsi dan 1 laporan di tingkat pusat. Pada tahun 2011, penyusunan FSVA merupakan kelanjutan dari FSVA 2010, sehingga dihasilkan 18 laporan di tingkat provinsi (provinsi yang belum menyusun FSVA pada tahun 2010) dan 1 laporan di tingkat pusat. Pada tahun 2012 telah disusun FSVA tingkat kabupaten, sehingga di hasilkan 100 laporan untuk kabupaten yang masuk dalam prioritas satu hingga tiga berdasarkan FSVA Nasional 2009. Pada tahun 2013, disusun kembali FSVA tingkat Nasional, sehingga diperoleh 1 laporan. Sedangkan pada tahun 2014, penyusunan FSVA ditujukan untuk pemutakhiran data FSVA provinsi tahun 2010 sehingga dihasilkan 14 laporan di tingkat provinsi dan 1 laporan di tingkat pusat.
- Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan :
 - Pada tahun 2010 & 2011 output dari indikator ini berupa hasil analisis ketersediaan pangan sebanyak 33 provinsi.
 - Sedangkan pada tahun 2012 hingga 2014 output dari indikator ini berupa Neraca Bahan Makanan di tingkat provinsi sejumlah 33 buku dan di tingkat nasional 1 buku serta satu laporan Analisis Situasi Akses Pangan dan satu laporan Pengembangan Akses Pangan, sehingga secara keseluruhan berjumlah 36 laporan. Walaupun dalam

penetapan kinerja tahun 2012 hanya tertulis target sebanyak 34 laporan tetapi dihasilkan 36 laporan. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2013 dan 2014.

- Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat pada tahun 2012 ditujukan untuk pelatihan penyusunan analisis ketersediaan pangan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk 33 provinsi dimana setiap provinsi diwakili oleh 2 aparat sehingga secara keseluruhan berjumlah 132 aparat. Pada tahun 2013 output yang ditetapkan berupa laporan pelatihan analisis ketersediaan pangan (2 laporan), analisis SKPG (2 laporan) serta peningkatan kapasitas LKD Demapan (4 laporan). Sedangkan pada tahun 2014 output yang ditetapkan berupa terlaksananya kegiatan pelatihan analisis ketersediaan pangan (2 laporan), analisis SKPG (2 laporan) serta peningkatan kapasitas petani (3 laporan).
- Penilaian atas kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dalam hal ini terkait dengan kegiatan Desa Mandiri Pangan mendapat apresiasi dari dunia internasional, melalui pemberian penghargaan dari Arab Gulf Programme for Development (AGFUND) untuk kategori 3 yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam pengembangan ide-ide inovatif dan adopsi program perintis, kebijakan dan operasionalisasi/pengalaman yang baik (policies and good practices) untuk mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat miskin, dan berhak atas hadiah berupa hibah sebesar US \$100.000 (seratus ribu US Dollar).

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan jika dilihat dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Hambatan dan Permasalahan

Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014 sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi untuk menghasilkan analisis yang akurat, karena data dan informasi sering dianggap bukan kegiatan prioritas;
2. Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi menyebabkan petugas Kabupaten/Kota jarang melakukan kunjungan lapangan ke kelompok sasaran;

3. Tingginya mutasi pegawai di daerah, sangat mempengaruhi kinerja daerah dan kemampuan pegawai daerah dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan: (a) jumlah KK miskin hasil DDRT tidak semua menjadi anggota kelompok afinitas, karena alokasi anggaran terbatas; (b) koordinasi provinsi dan kabupaten dalam DKP belum optimal; (c) pembinaan pendamping masih belum optimal; dan (d) kurangnya dukungan daerah dalam keterpaduan/sinergitas kegiatan untuk mempercepat pembangunan di lokasi demapan;
5. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SKPG diantaranya yaitu:
 - a) Ketersediaan data untuk analisis SKPG yaitu data yang sesuai dengan indikator SKPG yang ditetapkan, tidak seluruhnya dapat tersedia di setiap wilayah;
 - b) Terkait Tim Pokja SKPG dan koordinasinya: (a) beberapa provinsi dan kabupaten belum membentuk Tim SKPG; (b) efektifitas kerja Tim SKPG belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada proses analisis data dan pelaporan rutin oleh provinsi; (c) Koordinasi dengan dinas terkait dalam melakukan pemantauan dan mengumpulkan data tidak semuanya berjalan dengan baik; (d) Aparat di beberapa daerah masih belum memahami kegiatan SKPG sebagai sistem pemantauan pangan dan gizi serta alat analisis; (e) Sering terjadinya mutasi pejabat/pegawai yang menangani kegiatan SKPG, sehingga menghambat proses analisis SKPG, (f) aspek ketersediaan dan pemanfaatan untuk indikator SKPG masih terlalu tinggi persentasenya;
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyediaan data dan informasi di daerah terutama data NBM;
7. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan terdapat beberapa masalah atau kendala, antara lain : (a) Surat yang dikirim dari pusat tidak sampai ke penggilingan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya respon atau balasan dari penggilingan, dan surat yang kembali ke pengirim yang diakibatkan alamat yang dituju tidak jelas, salah, atau sudah pindah alamat; (b) Daerah kurang merespon kegiatan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan. Hal ini terlihat dari tidak semua provinsi mengirimkan data pengumpulan data mereka; (c) Banyak penggilingan yang sudah beralih fungsi seperti beralih menjadi gudang, salon, maupun markas tentara; (d) Banyak penggilingan yang sudah lama tidak beroperasi yang disebabkan karena tidak adanya tenaga kerja ataupun tidak

adanya modal yang mereka miliki; (e) Data dasar dari BPS tentang alamat dan kapasitas penggilingan kurang akurat;

8. Beberapa permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan dana hibah AGFUND:

a) LKD Naka Mura, Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah :

- Pemahaman pengurus tentang isi AD/ART yang telah disepakati oleh seluruh anggota LKD Nakamura masih kurang,
- Anggota kelompok yang meminjamkan dana di LKD Naka Mura yang berasal dari luar Desa Madukoro tidak berasal dari desa pelaksana program Desa mandiri Pangan maupun Desa Replika Mandiri Pangan.
- Usaha produktif yang dibiayai dari pinjaman dana AGFUND tidak hanya untuk sektor pertanian dalam arti luas, tetapi juga berbagai sektor usaha.
- SDM yang mengelola dana hibah AGFUND masih sangat terbatas pengetahuannya terutama dalam administrasi.

b) LKD Muntuk Lestari, Desa Muntuk

- Anggota kelompok LKD Munthuk Lestari sebagian besar merupakan pengrajin, sehingga apabila pemanfaatannya lebih besar untuk usaha produktif pertanian dikhawatirkan tingkat kegagalannya tinggi (resiko tinggi) karena tidak punya pengalaman dalam bidang pertanian.
- Untuk kelompok budidaya tanaman padi dan budidaya perikanan pencairan dana AGFUND sedikit mundur. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan dana menunggu datangnya musim hujan yang datangnya terlambat.

b. Upaya yang dilakukan

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam rangka mengatasi permasalahan antara lain : meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait penyediaan data dan informasi dan meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp.77.427.000.000,00. Kemudian ada penghematan anggaran, sehingga anggaran untuk kegiatan strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan

pangan menjadi Rp. 68.661.969.000,00 atau dihemat 11,32 persen dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Alokasi Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Pusat	7.059.723.000	6.524.534.285	92,42
2	Daerah	61.602.246.000	56.213.712.642	89,61
	- Provinsi (DK)	41.283.246.000	37.461.696.975	90,74
	- Kabupaten/Kota (TP)	20.319.000.000	18.752.015.667	92,29
	Total	68.661.969.000	62.738.246.927	91,37

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan TA. 2014 telah dialokasikan anggaran melalui Satker BKP Kementerian Pertanian sebesar Rp.7.059.723.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 6.524.534.285,00 atau 92,42 persen dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

No.	Uraian	Alokasi Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG	723.253.000	669.563.304	92,58
2	Laporan Hasil Penyusunan FSVA	745.663.000	626.823.500	84,06
3	Laporan Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan	2.864.738.000	2.610.170.975	91,11
4	Laporan Kegiatan dan Pembinaan (Output Generik)	2.726.069.000	2.617.976.506	96,03
	Total	7.059.723.000	6.524.534.285	92,42

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan di daerah, pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 61.602.246.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 56.213.712.642,00 atau 91,25 persen dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Alokasi Rp.	Realisasi Rp.	%	Ket
1	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Diberdayakan	30.166.757.000	27.330.915.025	90,60	DK
		17.759.190.000	16.452.916.587	92,64	TP
2	Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG	5.171.385.000	4.683.874.545	90,57	DK
		2.559.810.000	2.299.099.080	89,82	TP
3	Laporan Hasil Penyusunan FSVA	591.350.000	527.388.000	89,18	DK
4	Laporan Kajian Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses Pangan	1.580.967.000	1.458.916.425	92,28	DK
5	Laporan Kegiatan dan Pembinaan (Output Generik)	3.761.287.000	3.449.102.980	91,70	DK
6	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	11.500.000	11.500.000	100	DK
	Total	61.602.246.000	56.213.712.642	91,25	

3.3 Hasil Kinerja Tahun 2014

Hasil kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kemandirian Pangan

a. Desa Mandiri Pangan Reguler

Kegiatan Desa Mandiri Pangan tahun 2014 telah memasuki tahap pengembangan dengan total Desa yang dibina sebanyak 691 desa yang terdiri dari tahap pengembangan di 429 desa dan tahap kemandirian di 292 desa. Pada tahun 2014 tidak ada penambahan lokasi baru sehingga kegiatan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan hanya pembinaan di tingkat propinsi hingga desa. Desa Mandiri Pangan yang dibina pada tahun 2014 adalah Desa Mandiri Pangan Reguler di 691

Desa Mandiri Pangan tahun 2011 dan tahun 2012, terealisasi 100 persen. Hasil evaluasi tahap pengembangan terlihat dari hasil evaluasi Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

- Evaluasi Tahap Pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2011

Untuk tahun anggaran 2011 telah dibangun 262 desa di 243 kabupaten/kota, yang juga dibina oleh pendamping yang bukan penyuluh pertanian. Setelah 4 tahun pendampingan secara bertahap, pada akhir tahun ke empat atau pada tahun 2014 dilakukan pengukuran keberhasilan kegiatan melalui Evaluasi Tahap Kemandirian. Dari 132 desa/kota atau 50,38 persen Desa Mandiri Pangan yang dibangun pada tahun 2011, menunjukkan: 20 desa atau 15% persen pada Klasifikasi Rendah (KR), 81 desa atau 61 persen Klasifikasi Sedang (KS), dan 31 desa atau 24 persen Klasifikasi Baik/Tinggi (KT).



Sebanyak 132 Desa Mandiri Pangan yang sudah menyampaikan laporan hasil evaluasi Tahap Kamandirian tersebut, dipandang sudah dapat mewakili desa yang dibangun, karena sudah diatas 30 persen untuk standar evaluasi.

- Evaluasi Tahap Kemandirian Desa Mandiri Pangan Tahun 2012

Pada tahun 2012, kegiatan Desa Mandiri Pangan diperluas dengan menambah lokasi sebanyak 429 Desa di 236 Kabupaten/Kota pada 33 propinsi, dibina oleh pendamping yang bukan penyuluh pertanian. Setelah 3 tahun pendampingan secara bertahap, pada akhir tahun ke tiga atau pada tahun 2014 dilakukan pengukuran keberhasilan kegiatan melalui Evaluasi Tahap Pengembangan. Dari 136 desa/kota atau 31,48 persen Desa Mandiri Pangan

~~yang dibangun pada tahun 2012, menunjukkan: 31 desa atau 23 persen pada~~

Klasifikasi Rendah (KR), 72 desa atau 53 persen Klasifikasi Sedang (KS), dan 33 desa atau 24 persen Klasifikasi Baik/Tinggi (KT).



Sebanyak 136 Desa Mandiri Pangan yang sudah menyampaikan laporan hasil evaluasi Tahap Pengembangan tersebut, dipandang sudah dapat mewakili desa yang dibangun, karena sudah diatas 30 persen untuk standar evaluasi.

b. Kawasan Mandiri Pangan

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung terpilih (3 s.d 5 kampung/desa), untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri. Rancangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Papua-Papua Barat, kepulauan, dan perbatasan dilaksanakan selama 5 tahap (5 tahun), meliputi Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan. Dalam tiga tahap pertama, pembinaan dan pendampingan dilaksanakan utamanya melalui kegiatan APBN, dua tahun terakhir diharapkan peran pemerintah daerah akan lebih dominan. Berdasarkan disain ini diharapkan adanya keberlanjutan dan kesinambungan program pengembangan dan manfaat dari implementasi kegiatan ini. Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dengan pendekatan wilayah kecamatan, melalui (1) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi sumberdaya, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penguatan kelembagaan untuk mendukung sistem ketahanan pangan di kawasan, dan (4) koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor dan sub sektor.

Pelaksanaan kegiatan kawasan mandiri pangan tahun 2014 telah memasuki tahap pengembangan dengan lokasi kawasan yang masih tetap di 109 kawasan, 60 Kabupaten/Kota, 13 Provinsi dan di tahap ke dua ini masih diberikan dana bansos di setiap kawasan sebesar Rp. 200.000.000. Pelaksanaan di kawasan mandiri pangan sebagai berikut :

- Lokasi Kawasan

Pada tahun 2014 lokasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2014 terjadi pengurangan lokasi di Provinsi NTT khususnya di Kabupaten Rote Ndao hal ini di karenakan bahwa pelaksanaan kegiatan tahap persiapan Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan tahun 2013, di Kabupaten Rote Ndao tidak berjalan sebagaimana aturan di Pedoman Pelaksana Kawasan Mandiri Pangan, sehingga sampai dengan bulan Nopember 2013 dana bansos tidak dapat dicairkan ke rekening kelompok. Untuk memperkuat tentang pencairan dana Bansos Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah menyampaikan surat ke daerah bahwa dana bansos Tahap II (tahun 2014) dapat dicairkan oleh kelompok apabila hasil evaluasi tahap persiapan sudah memenuhi ketentuan dan sudah mencapai klasifikasi tinggi (KT). Capaian lokasi kawasan mandiri pangan tidak mencapai target 100% dari lokasi kawasan 109 kawasan menjadi 107 kawasan atau 98% hal ini sudah di revisi dalam PK penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan kerawanan Pangan

- Pemanfaatan Dana Bansos

Pencairan dana bansos tahap II diberikan kepada kelompok/LK yang sudah ditetapkan untuk mengelola dana usaha kawasan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi terhadap pemanfaatan dana bansos tahap I. Hasil evaluasi kemudian menjadi bahan rekomendasi untuk pencairan dana bansos tahap II ke rekening. RUK yang disusun oleh kelompok. Penyusunan RUK didasarkan pada Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) yang disusun oleh Kelompok, Pendamping, FKK, dan LKK. RUK yang sudah disusun oleh kelompok, diajukan kepada LKK untuk mendapatkan pinjaman modal dengan persetujuan FKK dan Pendamping. Peminjaman modal dari kelompok ke LKK harus disertai Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bansos antara

LKK dengan Kelompok. Tahun 2014 pemanfaatan dana bansos hanya 91,7 persen yang dicairkan atau sekitar Rp 20.000.000.000. Kabupaten yang tidak mencairkan yaitu Kutai Barat (2 kawasan), Nunukan (2 kawasan), Malinau (1 kawasan), Rote Ndao (2 kawasan), Mimika (2 kawasan). Alasan tidak mencairkan dikarenakan kawasan tidak dapat melengkapi syarat sesuai juknis, dan tidak bisa melengkapi 5 desa sesuai syarat yang telah ditentukan dalam Pedoman Kawasan Mandiri Pangan.

Tabel 5. Pemanfaatan Bansos Kawasan Mandiri Pangan

No	Lokasi Kawasan	Target	Realisasi	
			Tahun 2013	2014
	109 Kawasan	109 Kawasan	100 persen	91,7 persen

- Kegiatan Usaha Produktif

Perkembangan kegiatan usaha di Kawasan Mandiri Pangan terdiri dari non farm, off farm, non farm. Dari hasil laporan daerah diketahui kegiatan usaha yang dilakukan tergantung kondisi daerah dan kebutuhan yang ada di kawasan, ada beberapa kawasan penggunaan usaha produktifnya tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksana seperti kegiatan usaha diarahkan pada simpan pinjam.

Dari hasil pemantauan ke daerah Kawasan Desa Mandiri Pangan di peroleh beberapa kendala sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman tentang program Demapan Kawasan.
- 2) Kurangnya aparat kabupaten & mutasi pegawai yang menangani kegiatan Desa/Kawasan Mapan, sehingga pelaksanaan tidak maksimal antara lain : database belum selesai disusun
- 3) Keterbatasan pendamping, kurangnya pembinaan & pemberdayaan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, Kepulauan & Papua-Papua Barat

- 4) Forum Komunikasi Kawasan (FKK) & LKK belum optimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di desa, karena kurang paham maksud dan tujuan program.
- 5) Persepsi masyarakat bahwa bansos adalah bantuan yang tidak dikembalikan
- 6) Kelompok keberatan menyerahkan pengelolaan dana kepada LKK karena rekening atas nama kelompok
- 7) Pengelolaan administrasi keuangan Kelpk & LKK yang masih kurang
- 8) Kegiatan usahanya masih banyaknya simpan pinjam yang dikelola oleh kelompok.
- 9) Kegiatan usaha pertanian sangat dipengaruhi oleh iklim, usaha pertanian masih dilakukan pada skala kecil & belum berorientasi pada pasar
- 10) Dana bansos belum dimanfaatkan secara optimal, masih bersifat perorangan (dibagi-bagikan rata) tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksana Kawasan Mandiri Pangan

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2014 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- pembuatan pedoman umum desa mandiri pangan, pedoman pelaksana desa mandiri pangan, pedoman pelaksana kawasan mandiri pangan, modul kawasan desa mandiri
- Pertemuan: Apresiasi kawasan mandiri pangan, pertemuan indikator kawasan mandiri pangan, workshop desa mandiri pangan dan kawasan mandiri pangan
- Aplikasi database mandiri pangan berbasis web

c. Pengembangan Akses Pangan

Untuk mendukung kegiatan pengembangan akses pangan, dilakukan kegiatan pertemuan peningkatan akses pangan yang bertujuan memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan peningkatan akses pangan dimana kegiatan ini meliputi:

a) Koordinasi Peningkatan Akses Pangan

Koordinasi peningkatan akses pangan bertujuan untuk menjangkau permasalahan-permasalahan terkait ketersediaan dan akses pangan secara umum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan Focus Group Discussion.

b) Pertemuan/Focus Group Discussion Peningkatan Akses Pangan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun bahan kebijakan peningkatan akses pangan melalui kemandirian produksi pertanian berdasarkan lahan yang sehat, ketersediaan air yang mencukupi, dan penggunaan benih/bibit unggul yang mandiri.

Pertemuan/FGD Peningkatan Akses Pangan Tahun 2014 dilaksanakan di Bogor pada Selasa-Rabu, 2-3 Desember 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian/Lembaga terkait, pelaku sektor pertanian, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Materi dan narasumber pada Pertemuan/FGD Peningkatan Akses pangan, yaitu:

- 1) Pemanfaatan mikroba dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui penyehatan lahan oleh Prof. Anton Muhabuddin.
- 2) Regulasi Perbenihan di Indonesia oleh Prof. Dwi andreas Santoso.
- 3) Peran Bulog dalam ekonomi perberasan oleh Direktur Pelayanan Publik, BULOG.
- 4) Dukungan regulasi untuk menjamin peningkatan produksi yang berkelanjutan (lahan, irigasi, benih) oleh Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementan.
- 5) Potensi ketersediaan air dan kebijakan pemanfaatannya untuk pertanian, oleh Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, Kementerian PU
- 6) Proses dan tahapan pemanfaatan mikroba dalam peningkatan produksi pertanian oleh Bapak Agung Suwondo.

Secara umum rumusan Focus Group Discussion meliputi 3 kelompok, yaitu : 1) Kelompok BUDIDAYA : Untuk keberhasilan usahatani, setidaknya ada 3 hal pokok yang sangat menentukan terkait aktivitas yang bisa dilakukan manusia, ketiganya meliputi: benih, lahan dan air; 2) Kelompok PEMASARAN: Terkait

wacana reorientasi bisnis Bulog, berlakunya AFTA dan dukungan terhadap petani untuk menghadapinya; dan 3) Kelompok SDM DAN KELEMBAGAAN.

Hasil Focus Group Discussion Peningkatan Akses Pangan adalah sebagai berikut:

ARAH KEDEPAN: Perbaiki Manajemen Usaha Tani - kembali ke basic pertanian :

- 1) Budidaya harus memunculkan ide “pertanian berkelanjutan” (sustainable agriculture), yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
- 2) Mengembalikan pertanian kepada pengertian dasarnya (back to basics) dengan melakukan perubahan paradigma sistem pertanian dari sistem eksploitatif menjadi pelayan kepada makhluk hidup.
- 3) Melakukan penciptaan pasar bagi seluruh hasil-hasil pertanian, sehingga pertanian tidak menghasilkan limbah dengan melakukan refocusing penelitian dari penciptaan benih unggul/perbaiki metode budidaya menjadi pemanfaatan bahan-bahan pertanian dan pemahaman interaksi berbagi makhluk hidup yang menopang tanaman/hewan.
- 4) Melakukan reformasi kelembagaan petani untuk melayani anggotanya sehingga kemandirian petani dapat dibangun secara internal (genuine).
- 5) Menghadirkan negara dalam berbagai aktivitas terkait usahatani, yang berarti adanya petugas/pendampingan pada : pengolahan lahan sehingga lahan yang diolah tetap terjaga kesuburannya; penyediaan benih unggul, budidaya dan pemeliharaan tanaman dari hama/penyakit tanaman/hewan sampai pemasaran hasil-hasilnya; pendampingan terhadap petani dalam proses hukum dengan pihak lain dalam kaitan dengan budidaya pertanian.
- 6) Melakukan reformasi birokrasi dimana birokrasi dapat melayani petani mulai dari penyehatan lahan, penyediaan air, penyediaan benih unggul/indukan sampai pada pengolahan/pemasaran hasil-hasil pertanian dan turunannya.
- 7) Operasionalisasi pencapaian swasembada pangan ataupun peningkatan ketahanan pangan dalam kerangka perwujudan kedaulatan pangan harus dikembalikan kepada penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar usaha pertanian yang dapat memberikan kesejahteraan bagi petani (pelaku usaha), yang meliputi: 1). Penyehatan lahan disetiap desa; 2). Penyediaan

sumber air sepanjang tahun di setiap desa; 3). Pengembangan; 4). Pemanfaatan setiap jengkal lahan di setiap desa sehingga tidak ada lahan terlantar; 5). Penyediaan industri pengolahan dan atau perwakilan-perwakilannya di setiap desa, sehingga setiap desa tidak ada limbah pertanian; 6). Penyediaan pasar dan infrastruktur penunjang (gudang dsb) di setiap desa; 7). Pengembangan dan penyediaan cadangan pangan di setiap desa; 8). Mengedukasi masyarakat tentang terkait kualitas konsumsi pangan dengan memanfaatkan berbagai sumber-sumber bahan makanan yang ada, sehingga setiap desa tidak memiliki limbah makanan; dan 9). Mengurangi jumlah penduduk miskin di desa dengan target pendapatan rumah tangga tani minimal sama dengan pendapatan per kapita saat ini yaitu Rp. 34 juta.

- 8) Rekonstruksi kelembagaan petani sehingga kelembagaan tersebut dapat melayani petani bukan malah menjadi beban petani, terutama dalam memperpendek biaya tataniaga dan melindungi petani dalam kaitannya dengan pasar domestik yang semakin terbuka, serta dapat membantu menekan biaya-biaya terkait yang dengan biaya tenaga kerja dalam usahatani.

2. Analisis Penanganan Daerah/Lokasi Rawan Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Kegiatan SKPG bertujuan untuk menganalisis situasi pangan dan gizi; meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi; dan mengantisipasi terjadinya rawan pangan. Sasaran kegiatan SKPG terpetakannya situasi pangan dan gizi dan terantisipasi kejadian rawan pangan secara dini di 455 lokasi, yang terdiri dari pusat, 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota.

SKPG diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG. Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Data bulanan dan tahunan tersebut menginformasikan tentang 3 (tiga) indikator utama yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk menginformasikan situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Hasil SKPG ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian

kerawanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam melaksanakan SKPG, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya. Hal ini dipertegas juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah bahwa kepala daerah wajib melaporkan situasi ketahanan pangan di daerah sebagai bagian dari LPPD. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota bahwa target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai pada tahun 2015 sebesar 60 persen.

Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dilakukan setiap bulan (analisis bulanan) dan tahun (analisis tahunan) yang digambarkan dalam kondisi rawan (warna merah), waspada (warna kuning) dan tahan (warna hijau). Indikator yang digunakan dalam analisis dilihat dari aspek ketersediaan, aspek akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan, serta data spesifik lokal yang berasal dari laporan Tim Pokja Propinsi dan kabupaten/kota.

Pada laporan bulanan (analisis bulanan), digunakan indikator ketersediaan: luas tanam dan luas puso; indikator akses: perkembangan harga pangan komoditas utama dan strategis, dan indikator pemanfaatan: status gizi balita. Hasil analisis SKPG bulanan ini bertujuan sebagai isyarat dini dalam penanganan daerah rawan pangan dan juga menjadi dasar untuk melakukan investigasi pada daerah yang terindikasi rawan pangan. Selanjutnya hasil investigasi tersebut menjadi rekomendasi untuk dilakukan intervensi terhadap masyarakat yang mengalami rawan pangan. Analisis bulanan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan melalui Pokja SKPG, analisis yang berbentuk laporan tersebut disampaikan ke Pokja tingkat Propinsi dan tembusan ke Pusat. Dalam pelaksanaannya, laporan dari kabupaten/kota sering mengalami keterlambatan dikarenakan ketersediaan data sehingga mempengaruhi penyusunan laporan bulanan propinsi. Pada laporan tahunan (analisis tahunan), digunakan indikator ketersediaan yang dilihat dari produksi tanaman pangan (beras, jagung, singkong, ubi kayu),

indikator akses dilihat dari perkembangan harga pangan komoditas utama dan strategis serta jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan indikator pemanfaatan dilihat dari status gizi balita. Berdasarkan analisis yang disusun laporan Tim Pokja SKPG tersebut, maka Tim akan melakukan investigasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Gubernur maupun Bupati/Walikota. Pengolahan data tahunan berdasarkan 3 aspek tersebut yang selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh wilayah/daerah yang terindikasi rawan, waspada, dan aman pangan. Hasil analisis SKPG tahunan ini bertujuan sebagai dasar untuk perencanaan jangka menengah dan panjang dalam penanganan daerah rawan pangan.

Pelaksanaan kegiatan SKPG pada 455 lokasi dilaporkan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan utama SKPG di Pusat meliputi: Kajian Perkembangan Kerawanan Pangan di Indonesia dan dan Koordinasi Tim Pokja SKPG
 - a. Kajian Perkembangan Kerawanan Pangan

Kegiatan Kajian Kerawanan Pangan di Indonesia dilaksanakan melalui kerjasama dengan BPS dengan tujuan: (1) menyusun dan menganalisis data kerawanan pangan provinsi tahun 1993-2013 dan kabupaten/kota tahun 2011-2013; (2) menganalisis trend data kerawanan pangan pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota; (3) menganalisis faktor yang mempengaruhi naiknya/fluktuasi kerawanan pangan; (4) menganalisis hubungan antara kemiskinan, karakteristik rumatangga rawan pangan, angka rawan pangan berdasarkan kuantil pengeluaran, dan keterkaitan angka rawan pangan dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Kegiatan ini dengan dilaksanakan dengan mengumpulkan data terkait kerawanan pangan dari berbagai sumber atau referensi yang berasal dari BPS sendiri, BKP (Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan), media elektronik, jurnal, buku, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Data-data yang dikumpulkan tersebut kemudian dikompilasi, dianalisis faktor-faktor apa yang berpengaruh, faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya angka rawan pangan (ARP). Berdasarkan kegiatan ini dapat diperoleh kesimpulan hal-hal sebagai berikut: (1) ARP Indonesia selama 1993-2013 sangat fluktuatif, berkisar antara 11,07 - 20,67 persen; Provinsi dengan angka rawan pangan paling rendah yaitu Provinsi Bali, berkisar 3- 9 persen. Sedangkan yang paling tinggi yaitu Provinsi Papua yang mencapai 45,32 persen pada 2013; (b) ARP menurut kabupaten/kota tahun 2011-2013, diketahui kabupaten dengan tingkat rawan

pangan paling rendah yaitu kabupaten Tapanuli Selatan dengan angka rawan pangan berturut-turut 1,36 persen; 1,37 persen dan 0,81 persen. Angka rawan pangan tertinggi selama 2011-2013 terdapat di kabupaten Puncak Jaya dengan ARP tahun 2011-2013 sebesar 46,45 persen,; 85,18 persen dan 79,33 persen (c) Karakteristik rumah tangga rawan pangan yang disajikan meliputi persentase wanita usia subur yang buta huruf, persentase kepala rumah tangga menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah anggota rumah tangga; (d) Kajian ini juga menyajikan informasi mengenai perkembangan kemiskinan dan gini ratio secara nasional. Tingkat kemiskinan di Indonesia dalam dua dekade cenderung menurun, dan gini ratio berkisar antara 0,3 sampai 0,4; (e) Untuk mengetahui hubungan kerawanan pangan dengan kemiskinan, disajikan perkembangan angka rawan pangan menurut kuantil. Penduduk yang berada pada kuantil pertama tergolong dalam penduduk relatif miskin. Angka rawan pangan pada penduduk kuantil pertama paling tinggi diantara semua kuantil, yang menunjukkan ada hubungan antara kemiskinan dan kerawanan pangan; (f) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan pengukuran pendapatan daerah diduga mempunyai pengaruh terhadap kerawanan pangan suatu wilayah. Hasil kajian menunjukkan adanya hubungan antara PDRB dengan angka rawan pangan meskipun hubungan tersebut kecil dan negative, artinya semakin tinggi PDRB maka kerawanan pangan di wilayah tersebut semakin rendah.

b. Rapat Koordinasi Pokja SKPG Pusat

Tujuan dari Rapat Koordinasi Pokja SKPG Pusat adalah (a) Merumuskan bahan kebijakan terkait dengan penanganan rawan pangan dan gizi; (b) Konsolidasi antar anggota Pokja, terkait tugas dan fungsi masing-masing instansi dan perannya terhadap kegiatan analisis SKPG; (c) Mengevaluasi pelaksanaan program SKPG terkait dengan situasi pangan dan gizi di propinsi dan kabupaten/kota. Rapat koordinasi Pokja SKPG Pusat yang dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu:

Rapat Koordinasi Pokja SKPG Pusat I, dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014 di Jakarta yang dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Tim/Pokja SKPG Pusat serta Lembaga Internasional serta Badan/Unit/Kantor yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi, dengan rumusan hasil dari Rapat Koordinasi Tim/Pokja SKPG Pusat yaitu: (a) SKPG pada hakikatnya adalah penanganan kerawanan pangan dan gizi secara dini (early warning)

terhadap wilayah yang terindikasi rawan pangan dan gizi (analisis SKPG bulanan), dengan tetap melakukan analisis SKPG tahunan sebagai acuan perencanaan tahun ke depan; (b) BKP Pusat membuat Pedoman Umum SKPG, sedangkan provinsi dan kabupaten/kota menjabarkan dalam petunjuk pelaksanaan/teknis berdasarkan kepada karakteristik masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tersebut dengan menggunakan pedum sebagai acuan; (c) Terkait dengan indikator yang diusulkan oleh masing-masing daerah terhadap SKPG (pasokan), maka perlu mempertimbangkan indikator tersebut secara akurat, relevan dan ketersediaan datanya (akan dibahas lebih lanjut oleh Tim/Pokja SKPG Pusat); (d) Permentan Nomor 43 tahun 2010 masih relevan digunakan untuk pemantauan situasi pangan dan gizi. Namun demikian perlu kajian terutama untuk wilayah perkotaan, kepulauan, dan wilayah-wilayah yang memiliki spesifikasi tertentu. Kajian ini dapat dilakukan oleh BKP Pusat dan WFP dengan melibatkan beberapa daerah percontohan, untuk penyusunan Petunjuk Pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi wilayah (spesifikasi lokal). (e) Hasil pengumpulan informasi pada FGD pembahasan indikator analisis SKPG ini, akan dikaji dengan Pokja SKPG Pusat untuk dijadikan bahan penyusunan revisi Pedoman SKPG (Permentan No.43 tahun 2010). (f) Perlu sinkronisasi dengan Dewan Ketahanan Pangan terkait pelaksanaan kegiatan SKPG yang melibatkan Tim/Pokja SKPG. (g) Revisi Permentan Nomor 43 Tahun 2010 termasuk pada penyempurnaan analisis/aplikasi, range (threshold) indikator yang ada bukan untuk mengganti indikator yang digunakan dalam Permentan Nomor 43 tahun 2010.

Rapat Koordinasi Pokja SKPG Pusat II, dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 di Jakarta yang dihadiri oleh Tim Pokja SKPG Pusat yang dihadiri Tim Pokja SKPG Pusat dan Pejabat lingkup Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. diperoleh hal-hal penting sebagai berikut: (a) Revisi Permentan No 43 tahun 2010 menyampaikan hasil pertemuan tim pokja tanggal 21 April 2014 dan hasil pembahasan tanggal 20 Juni 2014, terutama terkait pengerucutan indikator berdasarkan usulan dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu disampaikan juga mengenai kendala dalam menentukan indikator analisis, salah satunya mengenali ketersediaan data sampai level kecamatan atau desa;

Rapat Koordinasi Pokja SKPG Pusat III, dilaksanakan pada tanggal 25 November 2014 di Jakarta yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 13 November 2014 yang menyepakati indikator SKPG sebagai draft

revisi Permentan No. 43 Tahun 2010. Rapat dihadiri oleh anggota Tim Pokja SKPG. Berdasarkan hasil pemaparan dan diskusi diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (a) Perlu dilakukan kajian untuk threshold/batas atas dan batas bawah pada indikator-indikator dalam aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan berdasarkan draft revisi Permentan No. 43 Tahun 2010; indikator pada wilayah perkotaan, dimana disepakati hanya digunakan indikator akses dan pemanfaatan pangan, sehingga perlu diperjelas mengenai definisi operasional mengenai perkotaan tersebut; penentuan skor komposit pada aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, baik pada analisis bulanan dan tahunan; (b) Tim/Pokja SKPG menyepakati untuk Tahun 2015 tetap menerapkan SKPG berdasarkan Permentan No. 43 Tahun 2010, sebagai alat untuk mengetahui situasi pangan dan gizi; (c) Indikator SKPG berdasarkan draft revisi Permentan No.43 Tahun 2010, perlu untuk dilakukan ujicoba untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan pada masing-masing wilayah.

2) Kegiatan SKPG di Daerah dilaksanakan di 33 Propinsi dan 421 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan di Propinsi meliputi: peningkatan kapasitas aparat pada Propinsi/kabupaten, serta koordinasi dengan tim pokja untuk penyusunan laporan. Namun demikian terdapat 1 propinsi yang tidak melaksanakan kegiatan SKPG yaitu Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan dilakukan pemotongan anggaran yang mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan SKPG

3. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) FSVA Provinsi

Sejak tahun 2002, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) menyusun profil geografis yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama tersebut menghasilkan Peta Kerawanan Pangan – Food Insecurity Atlas (FIA) Tahun 2005, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan – Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Nasional Tahun 2009, FSVA Tingkat Provinsi Tahun 2010 dan 2011, serta FSVA Tingkat Kabupaten Tahun 2012.

Pada tahun 2013 dilakukan pemutakhiran (updating) atas data FSVA Nasional tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2014 ini, dilakukan updating atas data FSVA Provinsi 2010 dan 2011. Sebagaimana FSVA Provinsi 2010 dan 2011, FSVA Provinsi 2014 ini juga

menganalisis tingkat ketahanan dan kerentanan pangan sampai dengan level kecamatan.

FSVA Provinsi 2014 mampu menjawab tiga pertanyaan dasar yang berkaitan dengan kerentanan pangan, yaitu dimana wilayah (kecamatan) yang paling rentan terhadap kerawanan pangan, mengapa wilayah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan, dan berapa banyak orang yang terkena dampak (estimasi). Sehingga, FSVA Provinsi 2014 dapat menjadi sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat mengidentifikasi daerah yang lebih rentan dan melakukan intervensi dalam penentuan investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Dengan disusunnya FSVA ini, diharapkan akan mampu memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan maupun ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

FSVA Provinsi 2014 mengacu pada tiga aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan. Masing-masing aspek tersebut diwakili dengan indikator-indikator yang mengimplementasikan aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan peta ini berjumlah 13 indikator, dimana terbagi dalam 9 indikator kerawanan pangan kronis dan 4 kerawanan pangan transien. Indikator kerawanan pangan kronis meliputi rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan produksi bersih (padi, jagung ubi kayu dan ubi jalar), persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, angka harapan hidup pada saat lahir, persentase balita tinggi kurang (stunting), persentase perempuan buta huruf, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, persentase keluarga yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan. Sedangkan kerawanan pangan transien meliputi deforestasi hutan, curah hujan, persentase daerah puso dan bencana (alam, sosial, teknologi dan lingkungan). Secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran 3. Metodologi dalam analisis komposit FSVA Provinsi 2014 adalah menganalisis 9 indikator kerawanan pangan kronis dengan menggunakan Principal Component Analysis (PCA), Cluster Analysis dan Discriminant Analysis sehingga dihasilkan ketahanan pangan komposit.

Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan komposit, hasil FSVA Provinsi sebagai berikut:

1) Aceh

Prioritas 1 sebanyak 42 kecamatan (16%), Prioritas 2 sebanyak 41 kecamatan (16%), Prioritas 3 sebanyak 37 kecamatan (14%), Prioritas 4 sebanyak 45 kecamatan (17%), Prioritas 5 sebanyak 74 kecamatan (28%) dan Prioritas 6 sebanyak 21 kecamatan (8%).

2) Bengkulu

Prioritas 1 sebanyak 10 kecamatan (9%), Prioritas 2 sebanyak 29 kecamatan (25%), Prioritas 3 sebanyak 1 kecamatan (1%), Prioritas 4 sebanyak 25 kecamatan (22%), Prioritas 5 sebanyak 28 kecamatan (24%) dan Prioritas 6 sebanyak 22 kecamatan (19%).

3) Jambi

Prioritas 1 sebanyak 11 kecamatan (9%), Prioritas 2 sebanyak 13 kecamatan (11%), Prioritas 3 sebanyak 25 kecamatan (21%), Prioritas 4 sebanyak 30 kecamatan (25%), Prioritas 5 sebanyak 10 kecamatan (8%) dan Prioritas 6 sebanyak 29 kecamatan (25%).

4) Sumatera Selatan

Prioritas 1 sebanyak 20 kecamatan (11%), Prioritas 2 sebanyak 28 kecamatan (15%), Prioritas 3 sebanyak 18 kecamatan (10%), Prioritas 4 sebanyak 40 kecamatan (22%), Prioritas 5 sebanyak 19 kecamatan (10%) dan Prioritas 6 sebanyak 61 kecamatan (33%).

5) Lampung

Prioritas 1 sebanyak 40 kecamatan (20%), Prioritas 2 sebanyak 23 kecamatan (12%), Prioritas 3 sebanyak 37 kecamatan (19%), Prioritas 4 sebanyak 25 kecamatan (13%), Prioritas 5 sebanyak 46 kecamatan (23%) dan Prioritas 6 sebanyak 25 kecamatan (13%).

6) Nusa Tenggara Barat

Prioritas 1 sebanyak 5 kecamatan (5%), Prioritas 2 sebanyak 16 kecamatan (15%), Prioritas 3 sebanyak 11 kecamatan (10%), Prioritas 4 sebanyak 26 kecamatan (25%), Prioritas 5 sebanyak 28 kecamatan (26%) dan Prioritas 6 sebanyak 20 kecamatan (19%).

7) Nusa Tenggara Timur

Prioritas 1 sebanyak 39 kecamatan (14%), Prioritas 2 sebanyak 39 kecamatan (14%), Prioritas 3 sebanyak 19 kecamatan (7%), Prioritas 4 sebanyak 78 kecamatan (27%), Prioritas 5 sebanyak 61 kecamatan (21%) dan Prioritas 6 sebanyak 48 kecamatan (17%).

8) Kalimantan Barat

Prioritas 1 sebanyak 23 kecamatan (14%), Prioritas 2 sebanyak 26 kecamatan (16%), Prioritas 3 sebanyak 21 kecamatan (13%), Prioritas 4 sebanyak 22 kecamatan (13%), Prioritas 5 sebanyak 34 kecamatan (21%) dan Prioritas 6 sebanyak 38 kecamatan (23%).

9) Kalimantan Selatan

Prioritas 1 sebanyak 12 kecamatan (9%), Prioritas 2 sebanyak 37 kecamatan (26%), Prioritas 3 sebanyak 21 kecamatan (15%), Prioritas 4 sebanyak 19 kecamatan (13%), Prioritas 5 sebanyak 22 kecamatan (16%) dan Prioritas 6 sebanyak 30 kecamatan (21%).

10) Kalimantan Tengah

Prioritas 1 sebanyak 8 kecamatan (7%), Prioritas 2 sebanyak 42 kecamatan (35%), Prioritas 3 sebanyak 22 kecamatan (18%), Prioritas 4 sebanyak 11 kecamatan (9%), Prioritas 5 sebanyak 22 kecamatan (18%) dan Prioritas 6 sebanyak 15 kecamatan (13%).

11) Gorontalo

Prioritas 1 sebanyak 20 kecamatan (33%), Prioritas 2 sebanyak 8 kecamatan (13%), Prioritas 3 sebanyak 9 kecamatan (15%), Prioritas 4 sebanyak 16 kecamatan (26%), Prioritas 5 sebanyak 0 kecamatan (0%) dan Prioritas 6 sebanyak 8 kecamatan (13%).

12) Sulawesi Tengah

Prioritas 1 sebanyak 15 kecamatan (10%), Prioritas 2 sebanyak 27 kecamatan (17%), Prioritas 3 sebanyak 44 kecamatan (28%), Prioritas 4 sebanyak 18 kecamatan (12%), Prioritas 5 sebanyak 46 kecamatan (30%) dan Prioritas 6 sebanyak 5 kecamatan (3%).

13) Sulawesi Tenggara

Prioritas 1 sebanyak 22 kecamatan (12%), Prioritas 2 sebanyak 49 kecamatan (26%), Prioritas 3 sebanyak 23 kecamatan (12%), Prioritas 4 sebanyak 30 kecamatan (16%), Prioritas 5 sebanyak 40 kecamatan (21%) dan Prioritas 6 sebanyak 23 kecamatan (12%).

14) Maluku

Prioritas 1 sebanyak 18 kecamatan (23%), Prioritas 2 sebanyak 8 kecamatan (10%), Prioritas 3 sebanyak 20 kecamatan (26%), Prioritas 4 sebanyak 19 kecamatan (25%), Prioritas 5 sebanyak 10 kecamatan (13%) dan Prioritas 6 sebanyak 2 kecamatan (3%).

4. Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan

Kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan terdiri dari :

a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan

Informasi situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan ketersediaan pangan wilayah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang telah dilakukan di tingkat pusat dan provinsi. Penyusunan Neraca Bahan Makanan bertujuan untuk memperoleh data ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk energi, protein dan lemak.

Pada tahun 2014, telah disusun Buku NBM Indonesia 2012-2013 yang berisi data 2012 Angka Tetap, 2013 Angka Sementara dan 2014 Angka Perkiraan.

Hasil analisis Buku NBM Tahun 2012 Tetap dan 2013 Sementara sebagai berikut :

- a) Ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2012 sebesar 3.896 kkal dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 3.849 kkal. Dilihat dari anjuran Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan WNPG Tahun 2004 sebesar 2.200 kkal/kapita/hari, total ketersediaan pada tahun 2012 sudah melebihi 177% dan 175% pada tahun 2013.
- b) Tingkat ketersediaan protein per kapita per hari juga sudah melebihi dari anjuran AKE berdasarkan WNPG Tahun 2004 sebesar 57 gram/kapita/hari, yaitu sebesar

- 88,99 gram/kapita/hari pada tahun 2012 dan 89,26 gram/kapita/hari atau 156% lebih besar pada tahun 2012 dan 157% pada tahun 2013.
- c) Pangan nabati masih mendominasi ketersediaan energi setiap tahunnya. Pada tahun 2012 kontribusinya mencapai 95,1 persen dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 94,4 persen. Pangan hewani memberikan kontribusi terhadap ketersediaan energi sebesar 4,8 persen pada tahun 2012 dan meningkat kontribusinya pada tahun 2013 menjadi 5,6 persen.
 - d) Kelompok pangan yang bersumber dari nabati juga memberikan kontribusi yang dominan pada ketersediaan protein. Pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 82,2 persen, sedangkan protein yang berasal dari pangan hewani 17,7 persen. Pada tahun 2013, proporsi protein dari nabati ini menurun menjadi 80,5 persen, dan proporsi pangan hewani meningkat menjadi 19,5 persen.
 - e) Ketersediaan lemak juga di dominasi oleh pangan nabati. Pada tahun 2012, kontribusi pangan nabati sebesar 87,5 persen dan mengalami penurunan menjadi 86,1 persen di tahun 2013. Kontribusi pangan hewani terhadap lemak mengalami peningkatan dari 12,5 persen di tahun 2012 menjadi 13,9 persen di tahun 2013.
 - f) Kelompok padi-padian merupakan kelompok bahan makanan yang menyumbangkan energi terbesar terhadap total ketersediaan pangan energi dan protein. Pada tahun 2012 ketersediaan kalori per kapita per hari pada kelompok padi-padian sebesar 2.259 kkal/kap/hari. Sedangkan pada tahun 2013, ketersediaan energi sebesar 2.277 kkal/kap/hari. Ketersediaan protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2012 dan 2013 mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 54,67 gram menjadi 55,12 gram untuk protein dan dari 12,64 gram menjadi 12,78 gram untuk lemak. Selain penyumbang energi terbesar, kelompok padi-padian juga merupakan penyumbang terbesar untuk ketersediaan kalori dan protein.
 - g) Kelompok makanan berpati terdiri dari komoditas ubi jalar, ubi kayu dan sagu. Sebagai penghasil karbohidrat yang potensial makanan berpati dapat digunakan sebagai sumber pangan alternatif substitusi beras, pakan ternak dan bahan baku industri. Tahun 2012 ketersediaan zat gizi per kapita per hari dari kelompok ini adalah kalori sebesar 299 kkal, protein 1,55 gram dan lemak 1,15 gram. Secara total ketersediaan energi kelompok makanan berpati di tahun 2013 sebesar 265 kkal/kapita/hari, protein 1,34 gram/hari dan lemak 1,05 gram/hari.

- h) Ketersediaan zat gizi per kapita per hari dari kelompok gula tahun 2012 kalori sebesar 212 kkal, protein 0,09 gram dan lemak 0,31 gram sedangkan pada tahun 2013 sebesar 252 kkal atau meningkat 18,87 persen dari tahun 2012, protein 0,08 gram dan lemak 0,27 gram.
- i) Kelompok Buah Biji Berminyak terdiri dari komoditas kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan kelapa, dengan total sumbangan energi sebesar 238 kkal/kapita/hari di tahun 2012, menurun menjadi 216 kkal/kapita/hari pada tahun 2013. Sebagai pangan sumber protein nabati, kelompok ini merupakan pensuplai protein kedua terbesar setelah kelompok padi-padian, yaitu 14,52 gram/kapita/hari (16,32 persen dari total ketersediaan protein), dan lemak 16,48 gram/kapita/hari tahun 2012. Sedangkan tahun 2013 pasokan proteinnya menurun menjadi 12,90 gram/kapita/hari (14,45 persen dari total ketersediaan protein), dan lemak 15,31 gram/kapita/hari.
- j) Kelompok buah-buahan merupakan pangan sumber vitamin dan mineral. Kontribusi energi dari kelompok ini sebesar 70 kkal/kapita/hari (1,80 persen dari total ketersediaan), protein 0,76 gram/kapita/hari dan lemak 0,45 gram/kapita/hari pada tahun 2012. Kontribusi energi dari kelompok buah-buahan pada tahun 2013 sebesar 67 kkal/kapita/hari (1,74 persen terhadap total ketersediaan), protein 0,72 gram/kapita/hari dan lemak 0,42 gram/kapita/hari.
- k) Seperti halnya dengan kelompok buah-buahan, sayuran juga merupakan kelompok pangan sumber vitamin dan mineral. Kontribusi energi dari kelompok sayuran tahun 2012 sebesar 32 kkal/kapita/hari (0,82 persen dari total ketersediaan), protein 1,57 gram/kapita/hari dan lemak 0,32 gram/kapita/hari. Pada tahun 2013, ketersediaan energi dari kelompok ini sebesar 33 kkal/kapita/hari (0,86 persen dari total ketersediaan), protein 1,59 gram/kapita/hari dan lemak 0,32 gram/kapita/hari.
- l) Kelompok daging merupakan pangan sumber protein hewani, kelompok daging memberikan sumbangan energi dan protein hewani kedua terbesar setelah kelompok ikan. Pada tahun 2012, kelompok ini memberikan kontribusi 55 kkal/kapita/hari (1,41 persen dari total ketersediaan) dan protein sebanyak 3,76 gram/kapita/hari serta lemak 4,35 gram/kapita/hari. Tahun 2013, ketersediaan dari kelompok daging meningkat menjadi sebesar 60 kkal/kapita/hari (1,56 persen dari total ketersediaan), 4,01 gram/kapita/hari protein dan 4,75 gram/kapita/hari lemak.

- m) Kelompok telur pada tahun 2012 memberikan sumbangan zat gizi sebesar 21 kkal/kapita/hari (0,54 persen dari total ketersediaan), protein 1,61 gram/kapita/hari dan lemak 1,55 gram/kapita/hari. Tahun 2013 ketersediaan energi komoditas telur mengalami sedikit peningkatan menjadi 22 kkal/kapita/hari (0,57 persen dari total ketersediaan) diikuti pula oleh protein menjadi 1,68 gram/kapita/hari dan lemak 1,60 gram/kapita/hari.
- n) Ketersediaan zat gizi per kapita yang berasal dari kelompok susu pada tahun 2012 sebesar 25 kkal/hari, protein 1,29 gram/hari dan lemak 1,42 gram/hari. Total ketersediaan zat gizi per kapita di tahun 2013 meningkat menjadi 25 kkal/hari, protein 1,30 gram/hari, lemak 1,42 gram/hari.
- o) Kelompok perikanan tahun 2012 memberi kontribusi energi per kapita terbesar diantara produk pangan hewani lainnya yaitu sebesar 81 kkal/hari (2,08 persen dari total ketersediaan energi), 9,12 gram/hari protein (10,25 persen dari total ketersediaan protein) atau 57,76 persen dari total ketersediaan protein hewani, dan 1,14 gram/hari lemak. Pada tahun 2013, ketersediaan energi meningkat menjadi 102 kkal/kapita/hari (2,65 persen dari total ketersediaan energi), protein sebesar 10,46 gram/kapita/hari (11,71 persen dari total ketersediaan protein atau 59,94 persen dari total ketersediaan protein hewani), dan lemak 1,34 gram/kapita/hari.
- p) Ketersediaan kelompok minyak dan lemak tahun 2012 sebesar 604 kkal/kapita/hari (99 persen berasal dari minyak nabati dan 1 persen berasal dari lemak hewani), protein 0,04 gram/kapita/hari dan lemak 33,62 gram/kapita/hari. Total ketersediaan per kapita dari kelompok minyak dan lemak pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 530 kkal/kapita/hari (99,05 persen berasal dari minyak nabati dan 0,95 persen berasal dari lemak hewani), protein 0,05 gram/kapita/hari dan lemak 30,17 gram/kapita/hari.

b. Analisis Situasi Akses Pangan

Kegiatan analisis ini lebih difokuskan terhadap peran rumah tangga/anggota masyarakat dalam institusi/organisasi sosial (formal dan informal) masyarakat dalam memanfaatkan modal sosial seperti partisipasi, norma sosial, kepercayaan (trust), dan jaringan (reciprocity) terkait penyediaan dan pemenuhan akan pangan bagi individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat.

Analisis akses pangan dari aspek sosial bertujuan untuk mengetahui karakteristik rumah tangga dalam mengakses pangan melalui analisis dimensi modal sosial yang berpengaruh terhadap akses pangan rumah tangga miskin.

Analisis Akses Pangan dari aspek sosial merupakan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui kondisi akses pangan di suatu wilayah dan tidak dapat menggambarkan kondisi nasional karena sangat bersifat objektif. Berikut tahapan penentuan sampelnya :

1) Penentuan Provinsi

Provinsi yang dipilih adalah 3 (tiga) provinsi yang menggambarkan daerah maju (Jawa tengah), daerah berkembang (Jambi), dan Kepulauan (Nusa Tenggara Barat).

2) Penentuan Kabupaten

Setiap provinsi dipilih satu kabupaten yang berdasarkan data SKPG bulanan pada bulan Desember 2013 yaitu memiliki kecamatan dengan indeks komposit 1 (aman), 2 (waspada), dan 3 (rawan). Kabupaten yang terpilih adalah Tanjung Jabung Timur (Jambi), Klaten (Jawa Tengah), dan Sumbawa (NTB).

3) Penentuan Kecamatan

Setiap Kabupaten dipilih 3 kecamatan yang berdasarkan data SKPG bulanan pada bulan Desember 2013 masing-masing memiliki indeks komposit 1 (aman), 2 (waspada), dan 3 (rawan). Penentuan Kecamatan dilakukan secara acak apabila di satu kabupaten memiliki lebih dari satu kecamatan dari masing-masing kriteria.

Setelah dilakukan pengacakan, untuk Kabupaten Klaten terpilih Kec. Kebon Arum yang mewakili Kecamatan dengan kondisi aman, Kec. Wedi mewakili kondisi waspada, dan Kec. Prambanan mewakili kondisi rawan. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpilih Kec. Geragai mewakili kondisi aman, Kec. Dendang mewakili kondisi waspada, dan Kec. Muara Sabak Timur mewakili kondisi rawan. Sedangkan dari Kab. Sumbawa terpilih Kec. Moyo Hilir yang mewakili kondisi aman, Kec. Maronge mewakili kondisi waspada, dan Kec. Ropang mewakili kondisi rawan.

4) Penentuan Desa/Kelurahan

Dari 3 kecamatan terpilih, tiap kecamatan dipilih 2 (dua) desa yang mewakili wilayah perkotaan dan atau pedesaan (penentuan wilayah perkotaan dan pedesaan berdasarkan data administratif BPS atau dengan pendekatan pusat ibu kota kecamatan sebagai wilayah perkotaan dan sekitarnya sebagai

pedesaan/identik pertanian). Sehingga desa/kelurahan yang dipilih jumlahnya 6 (enam) desa/kelurahan per kabupaten.

5) Pemilihan Rumah Tangga

Jumlah responden rumah tangga ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{Z^2_{1-\alpha/2} PQ}{d^2}$$

Ket :

n = Jumlah Sampel Minimal

$Z^2_{1-\alpha/2} = (1,962)^2$

P = Proporsi Keluarga Pra Sejahtera + Sejahtera I

d = margin of error 7%

Sehingga diperoleh jumlah responden sebagai berikut :

No	Provinsi	Kabupaten	$Z^2_{1-\alpha/2}$	P	Q= (1-P)	d*d	n
1	Jawa Tengah	Klaten	3.85	0.401	0.599	0.0049	192
2	Jambi	Tanjung Jabung Timur	3.85	0.3345	0.6655	0.0049	180
3	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	3.85	0.4151	0.5849	0.0049	192

Selanjutnya untuk menentukan responden rumah tangga dipilih berdasarkan data penerima raskin/BLT dari desa, kemudian dikonfirmasi ke minimal 3 orang kader untuk menentukan bahwa responden terpilih adalah rumah tangga miskin.

Data yang dikumpulkan meliputi:

- (1) Karakteristik demografi dan Rumah Tangga (Lokasi, Jenis Kelamin Kepala Keluarga, Usia Kepala Keluarga, Jumlah Anggota Keluarga, Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga, Jumlah anggota keluarga yang bekerja dan bermigrasi)
- (2) Jumlah dan jenis pekerjaan anggota keluarga
- (3) Kepemilikan cadangan pangan

(4) Modal Sosial

- a. Partisipasi (keikutsertaan dan peran anggota keluarga dalam kelompok/organisasi, dan keikutsertaan anggota keluarga dalam gotong royong di lingkungan tempat tinggal.
- b. Nilai dan Norma Sosial (Keberadaan sistem gotong royong dan dana sosial, serta kesadaran dalam membayar iuran/sumbangan/dana sosial, dan pengembalian pinjaman)
- c. Trust (Kepercayaan sesama anggota masyarakat dalam membantu masyarakat yang kekurangan pangan dan kekuatan solidaritas warga dalam penanggulangan kekurangan pangan.
- d. Resiprositas/Jaringan (Hubungan antar anggota keluarga dengan saudara, tetangga, lembaga/kelompok dalam mengatasi kekurangan pangan, mekanisme pemberian bantuan, akses terhadap pasar dan lembaga ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta akses terhadap informasi terkait pangan)
- e. Kesulitan dan Strategi Pemecahan Masalah kekurangan pangan (Jenis kesulitan atau masalah yang dihadapi selama tiga bulan terakhir, peran kelompok/organisasi dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta program bantuan yang diterima selama 3 bulan terakhir).

Pengumpulan data dilakukan di tiga Kabupaten terpilih yaitu Tanjung Jabung Timur (Jambi), Klaten (Jawa Tengah), dan Sumbawa (Nusa Tenggara Barat). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden oleh staf bidang akses pangan dibantu petugas dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan/kelurahan. Proses pengolahan data dimulai dengan melakukan analisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Analisis akses pangan dilakukan secara deskriptif dengan metode pembobotan dan keterkaitan/korelasi antar variable/indikator analisis tersebut.

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel dan SPSS 18,0 for Windows untuk penarikan kesimpulan. Proses pengolahan meliputi editing, coding, entry dan analisis. Untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel dianalisis menggunakan analisis Rank Spearman.

Variabel-variabel dianalisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum. Sedangkan untuk indikator modal sosial dilakukan penyekoran terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan standar deviasi. Berikut rumus menskorkan untuk indikator modal sosial :

Baik = rata-rata + standar deviasi

Sedang = antara rendah - tinggi

Buruk = rata-rata – standar deviasi

Berdasarkan pengolahan dan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut :

- (1) Sebagian besar (diatas 50%) responden di 3 (tiga) kabupaten pada provinsi terpilih memiliki jumlah anggota keluarga 1-4 jiwa.
- (2) Tingkat pendidikan kepala rumahtangga miskin hampir merata di tiga kabupaten, yaitu tidak sekolah, tidak tamat SD dan Tamat SD.\
- (3) Rata-rata mata pencaharian rumahtangga miskin di 3 kabupaten adalah buruh dan petani.
- (4) Hasil analisis di 3 provinsi berdasarkan lokasi hasil analisis SKPG Bulanan (kategori aman, waspada dan rawan) dan berdasarkan pemilihan lokasi Kabupaten terpilih pada 6 kecamatan menunjukkan hasil sbb:

a. Tingkat Partisipasi

1) Kecamatan berdasarkan analisis SKPG :

- Kecamatan kategori aman terbesar kecamatan Moyo Ilir (Sumbawa), baik 18,75 % dan terkecil kecamatan geragai (Tanjab Timur), rendah 95%
- Kecamatan kategori Waspada : terbesar kecamatan Wedi (Klaten), baik 10,94% dan terkecil kecamatan Dendang (Tanjab Timur), rendah 98,33%
- Kecamatan kategori Rawan : terbesar kecamatan Prambanan (Klaten) baik 14,0% dan terkecil kecamatan Muara Sabak Timur (Tanjab Timur), rendah 98,33%

2) Kecamatan berdasarkan Kabupaten terpilih :

- Terbesar Kecamatan Moyo Ilir Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, baik 18,75%

- Terkecil Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi, rendah 98,33%

b. Norma Sosial.

1) Kecamatan berdasarkan hasil analisis SKPG :

- Kecamatan kategori aman terbesar kecamatan Kebon Arum (Klaten), baik 35,94% dan terkecil kecamatan geragai (Tanjung Timur), rendah 70%
- Kecamatan kategori Waspada : terbesar kecamatan Wedi (Klaten), baik 14% dan terkecil kecamatan Dendang (Tanjung Timur), rendah 25%
- Kecamatan kategori Rawan terbesar kecamatan Prambanan (Klaten), baik 14,06% dan terkecil kecamatan Ropang (Sumbawa), rendah 33,44%

2) Kecamatan berdasarkan Kabupaten terpilih :

- Terbesar Kecamatan Kebon Arum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, baik 35,94%
- Terkecil Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB terkecil, rendah 23,44%

c. Tingkat Kepercayaan (Trust)

1) Kecamatan berdasarkan hasil analisis SKPG :

- Kecamatan kategori aman terbesar kecamatan Moyo Ilir (Sumbawa), baik 29,69% dan terkecil kecamatan geragai (Tanjung Timur), rendah 48,33%
- Kecamatan kategori Waspada : terbesar kecamatan Maronge (sumbawa), baik 17,19% dan terkecil kecamatan Dendang (Tanjung Timur), rendah 41,67%

- Kecamatan kategori Rawan terbesar kecamatan Ropang (Tanjung Timur), baik 17,10% dan terkecil kecamatan Muara Sabak Timur (Tanjung Timur), rendah 45,0%

2) Kecamatan berdasarkan Kabupaten terpilih :

- Terbesar Kecamatan Moyo Ilir Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, baik 29%
- Terkecil Kecamatan MST Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi, rendah 45%

d. Jaringan Sosial

1) Kecamatan berdasarkan hasil analisis SKPG :

- Kecamatan kategori aman terbesar kecamatan Moyo Ilir (Sumbawa), baik 53,13% dan terkecil kecamatan geragai (Tanjung timur), rendah 38.3%
- Kecamatan kategori Waspada : terbesar kecamatan Maronge (Sumbawa), 12.50% dan terkecil kecamatan Dendang (Tanjung Timur), 40.0%
- Kecamatan kategori Rawan terbesar kecamatan MST (Tanjung Timur), 21.7% dan terkecil kecamatan MST (Tanjung Timur), rendah 40.0%

2) Kecamatan berdasarkan Kabupaten terpilih :

- Terbesar Kecamatan Moyo Ilir Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, baik 53.13%
- Terkecil Kecamatan MST Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi, rendah 40 %

e. Modal Sosial

1) Kecamatan berdasarkan hasil analisis SKPG :

- Kecamatan kategori aman terbesar kecamatan Moyo Ilir (Sumbawa), baik 40.6% dan terkecil kecamatan geragai (Tanjung Timur), rendah 65.0%
- Kecamatan kategori Waspada : terbesar kecamatan Wedi (Klaten), baik 7.81% dan terkecil kecamatan Dendang (Tanjung Timur), rendah 60.0%

- Kecamatan kategori Rawan terbesar kecamatan Prambanan (Klaten), baik 10.94% dan terkecil kecamatan MST (Tanjung Timur), rendah 70%
- 2) Kecamatan berdasarkan Kabupaten terpilih :
- Terbesar Kecamatan Moyo Ilir Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, baik 40.6%
 - Terkecil Kecamatan MST Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi, rendah 70.0%
- (5) Secara umum, tingkat partisipasi rumah tangga di Kab. Tanjung Jabung Timur kategori rendah mencapai 95,00 – 98,33%, kategori sedang 1,67 – 5,00%, dan kategori baik tidak ada.
- (6) Norma sosial rumah tangga di ketiga kabupaten sebagian besar berada pada kategori sedang (Tanjung Timur 72,77%, Klaten 71,92, dan Sumbawa 77,65%).
- (7) Lebih dari 40% tingkat kepercayaan (trust) responden di 3 kabupaten berada pada kategori sedang (Tanjung Jabung Timur 46,67%, Klaten 72,92%, dan Sumbawa 77,65%).
- (8) Jaringan sosial responden di tiga kabupaten umumnya juga masuk ke dalam kategori sedang.
- (9) Dari hasil komposit empat dimensi sosial dapat dilihat bahwa rata-rata modal sosial kategori baik tertinggi berada di Kabupaten Sumbawa (16,67%), diikuti Kabupaten Klaten (11,98%), dan kemudian terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (1,11%).
- (10) Hampir sebagian responden di tiga kabupaten mengalami kekurangan pangan beberapa kali dalam setahun.
- (11) Jenis bantuan yang banyak diterima oleh responden adalah raskin.

Hubungan atau korelasi antara indikator modal sosial dan kejadian kekurangan pangan sangat lemah, sehingga diduga kejadian kekurangan pangan dipengaruhi oleh indikator lain seperti pendapatan dan daya beli.

c. Monitoring Akses Pangan di Tingkat Penggilingan

Kegiatan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan bertujuan untuk mengetahui stok gabah dan beras yang ada di penggilingan yang dapat diakses masyarakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 859/Kpts/TP.250/11/98 tentang Pedoman, Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras, skala usaha industri jasa penggilingan padi ditentukan oleh besar kecilnya kapasitas giling terpasang yang dimiliki suatu penggilingan padi. Skala usaha industri penggilingan padi terbagi dalam :

- a) Penggilingan padi besar, yaitu bila penggilingan padi memiliki kapasitas produksi terpasang lebih dari 3 ton/jam.
- b) Penggilingan padi sedang, yaitu bila penggilingan padi memiliki kapasitas produksi terpasang antara 1,5 ton/jam – 3 ton/jam.
- c) Penggilingan padi kecil, yaitu bila penggilingan padi memiliki kapasitas produksi terpasang kurang dari 1,5 ton/jam

Penentuan sampel dilakukan sebagai berikut:

- a) Penetapan kabupaten sebagai kelompok sampel (cluster).
- b) Pemilihan kabupaten dilakukan dengan metode PPS (Probability Proportional Sizes) yaitu dipilih kabupaten yang memiliki 3 golongan kapasitas penggilingan (penggilingan dengan kapasitas besar, sedang, dan kecil).
- c) Penggilingan yang memiliki jumlah penggilingan dengan kapasitas besar yang lebih banyak, peluang untuk dijadikan sampel lebih besar.
- d) Berdasarkan metode PPS (Probability Proportional Sizes) tersebut terpilih 100 kabupaten yang tersebar di 22 provinsi.
- e) Untuk menyamakan komposisi setiap kabupaten maka ditentukan 10 sampel per kabupaten dengan rincian penggilingan besar: penggilingan sedang: penggilingan kecil, yaitu 6:3:1.
- f) Ketentuan tambahan dalam penentuan besarnya sampel penggilingan besar yaitu apabila pada provinsi tersebut terdapat banyak penggilingan besar maka diambil 6 penggilingan, sedangkan jika kabupaten memiliki penggilingan besar kurang dari 6, maka penggilingan besarnya diambil semua. Jumlah sampel penggilingan besar yang diambil paling banyak adalah karena variasi dari penggilingan besar sangat tinggi sehingga dapat memperkuat validasi data, sedangkan penggilingan kecil cenderung homogen.
- g) Dari perhitungan tersebut ditentukan sampel sebanyak 521 penggilingan besar, 377 penggilingan sedang, dan 102 penggilingan kecil yang tersebar di 22 provinsi.

Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel Penggilingan per Kabupaten Kegiatan Monitoring Akses Pangan Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Populasi dan Jumlah Penggilingan Per Kabupaten

Provinsi	Nama Kabupaten	Populasi Penggilingan			Sampel		
		Besar	Sedang	Kecil	Besar	Sedang	Kecil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	Aceh Besar	20	28	116	6	3	1
	Pidie	16	26	214	6	3	1
	Gayo Lues	6	10	106	6	3	1
Sumatera Utara	Toba Samosir	12	8	249	6	3	1
	Deli Serdang	40	64	233	6	3	1
Sumatera Barat	Padang Pariaman	7	15	461	6	3	1
	Tanah Datar	1	54	404	1	8	1
	Lima Puluh Kota	3	26	579	3	6	1
Riau	Indragiri Hilir	1	8	327	1	8	1
Jambi	Kerinci	7	9	381	6	3	1
	Tanjung Jabung Timur	5	2	219	5	2	3
Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	6	43	928	6	3	1
	Muara Enim	4	46	484	4	5	1
	Banyu Asin	40	168	1968	6	3	1
	Ogan Komering Ulu Timur	11	79	1198	6	3	1
Lampung	Tanggamus	2	8	508	2	7	1
	Lampung Timur	3	19	946	3	6	1
	Lampung Tengah	8	73	1482	6	3	1
	Tulangbawang	1	16	304	1	8	1
Jawa Barat	Bogor	26	36	2006	6	3	1
	Sukabumi	23	167	3250	6	3	1
	Cianjur	63	187	3168	6	3	1
	Bandung	50	205	1346	6	3	1
	Garut	56	171	2634	6	3	1
	Tasikmalaya	25	155	2650	6	3	1
	Ciamis	19	63	2892	6	3	1
	Kuningan	8	45	777	6	3	1
	Majalengka	15	62	1095	6	3	1
	Sumedang	18	27	1137	6	3	1
	Indramayu	32	195	1492	6	3	1
	Subang	103	160	1730	6	3	1
	Purwakarta	44	195	585	6	3	1
	Karawang	22	106	1792	6	3	1
	Bekasi	15	83	1631	6	3	1
Tasikmalaya	8	48	200	6	3	1	
Jawa Tengah	Cilacap	4	18	1919	4	5	1
	Banyumas	6	54	712	6	3	1
	Kebumen	3	17	859	3	6	1
	Boyolali	13	19	721	6	3	1
	Klaten	8	41	477	6	3	1
	Sukoharjo	4	26	401	4	5	1
	Karanganyar	6	20	697	6	3	1
Sragen	18	81	672	6	3	1	

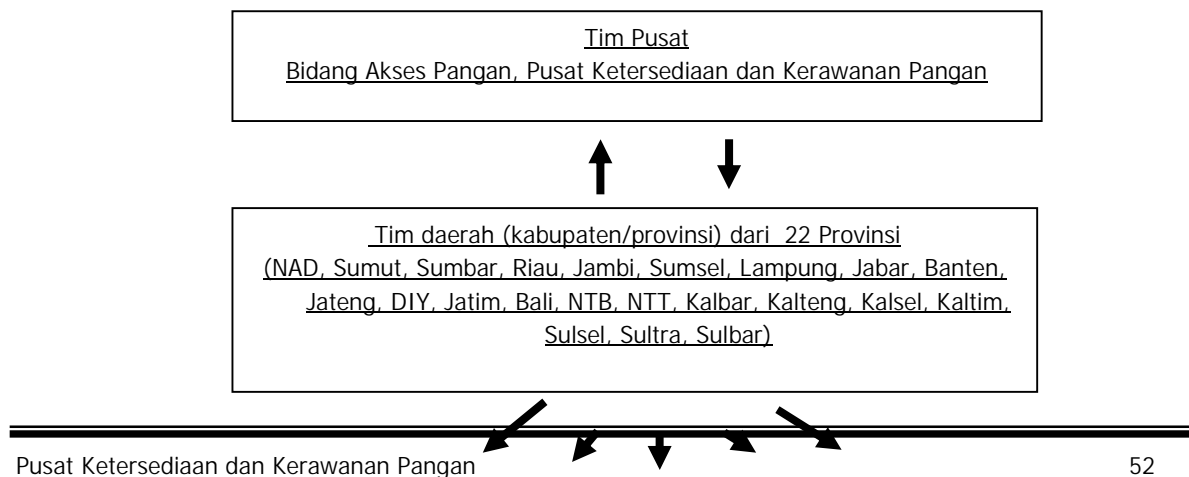
Provinsi	Nama Kabupaten	Populasi Penggilingan			Sampel		
		Besar	Sedang	Kecil	Besar	Sedang	Kecil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Grobogan	8	34	521	6	3	1
	Blora	12	15	625	6	3	1
	Pati	7	117	719	6	3	1
	Demak	19	60	541	6	3	1
	Batang	2	21	715	2	7	1
	Brebes	3	68	1129	3	6	1
Banten	Pandeglang	3	140	1884	3	6	1
	Lebak	2	8	2009	2	7	1
	Tangerang	11	52	1024	6	3	1
	Serang	1	39	1724	1	8	1
DIY	Bantul	7	24	226	6	3	1
Jawa Timur	Ponorogo	23	72	454	6	3	1
	Kediri	18	37	289	6	3	1
	Jember	22	62	1046	6	3	1
	Banyuwangi	31	79	316	6	3	1
	Bondowoso	22	30	1136	6	3	1
	Pasuruan	27	100	458	6	3	1
	Jombang	11	99	208	6	3	1
	Ngawi	9	57	243	6	3	1
	Bojonegoro	35	137	1185	6	3	1
	Lamongan	24	63	1172	6	3	1
	Gresik	7	48	492	6	3	1
	Sumenep	8	10	674	6	3	1
	Bali	Tabanan	12	33	532	6	3
Gianyar		15	44	303	6	3	1
NTB	Lombok Barat	17	15	188	6	3	1
	Lombok Tengah	22	72	795	6	3	1
	Sumbawa	13	19	223	6	3	1
	Bima	33	21	362	6	3	1
NTT	Kupang	29	34	148	6	3	1
	Rote Ndao	2	10	347	2	7	1
Kalimantan Barat	Landak	7	8	1644	6	3	1
	Pontianak	1	24	147	1	8	1
	Ketapang	6	25	709	6	3	1
	Sintang	9	13	1797	6	3	1
	Kapuas Hulu	4	15	1325	4	5	1
	Sekadau	6	10	782	6	3	1
	Melawi	8	3	929	6	3	1
Kalimantan Tengah	Kapuas	5	12	365	5	4	1
	Katingan	8	4	247	6	3	1
Kalimantan Selatan	Banjarnegara	10	51	356	6	3	1
	Hulu Sungai Selatan	10	2	143	7	2	1
	Hulu Sungai Tengah	5	4	202	5	4	1
Kalimantan Timur	Kutai Barat	11	4	263	6	3	1
	Penajam Paser Utara	3	39	102	3	6	1
Sulawesi Tenggara	Konawe	1	26	271	1	8	1
Sulawesi Selatan	Bulukumba	13	25	909	6	3	1
	Bantaeng	2	7	630	2	7	1
	Jeneponto	8	46	1518	6	3	1

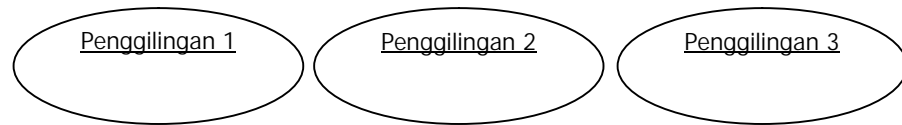
Provinsi	Nama Kabupaten	Populasi Penggilingan			Sampel		
		Besar	Sedang	Kecil	Besar	Sedang	Kecil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Takalar	10	119	905	6	3	1
	Gowa	25	87	2285	6	3	1
	Maros	6	22	913	6	3	1
	Bone	16	78	1967	6	3	1
	Wajo	6	85	510	6	3	1
	Pinrang	12	96	356	6	3	1
Sulawesi Barat	Polewali Mandar	5	17	374	5	4	1
	Mamuju	9	7	313	6	3	1
TOTAL					521	377	102

Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring akses pangan :

1) Pengambilan Data

Monitoring akses pangan ditingkat penggilingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan dibantu oleh Badan/ unit kerja ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten yang bekerja sama dengan BPS dan Perpadai.





- Tanggung jawab daerah (kabupaten/provinsi)
 - Memastikan pelaksanaan pengumpulan data sesuai jadwal;
 - Membantu pengumpulan data dari penggilingan;
 - Mengirimkan data yang telah dikumpulkan ke Pusat melalui surat/email/fax.

- Tanggung jawab pusat
 - Memastikan pelaksanaan pengumpulan data sesuai jadwal;
 - Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang telah dikumpulkan;
 - Pengolahan data dan penyusunan laporan dilakukan oleh Pusat 2 kali dalam setahun.

- Teknis Pengambilan Data
 1. Sebelum dilakukan pengambilan data, didahului dengan pengiriman surat pemberitahuan kepada BKP Provinsi, BKP Kabupaten, dan penggilingan yang menjadi responden.

 2. Data stok gabah dan beras diambil setiap akhir bulan melalui telepon oleh petugas dari tim pusat dan atau tim daerah.

2) Kegiatan monitoring ke provinsi, kabupaten/kota dan penggilingan

Kegiatan ini penting dilakukan untuk mendukung kegiatan pengumpulan data, penyusunan laporan kegiatan monitoring akses pangan, maupun koordinasi antara pusat dan daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan monitoring akses pangan yaitu:

- a) Menjelaskan konsep stok pangan serta menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan monitoring akses pangan ke BKP provinsi dan kabupaten yang dikunjungi;
- b) Menjelaskan metode dan prosedur pengumpulan data stok gabah/beras di penggilingan;
- c) Melakukan verifikasi data yang ada serta meminta data penggilingan yang masih aktif, baik data yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

- d) Sebagai uji petik untuk mengecek data stok gabah/beras yang telah diterima maupun informasi terkait penggilingan;
- e) Memotret lokasi kegiatan penggilingan, apakah dekat dengan lahan pertanian atau ditengah kota/permukiman disertai data visual;
- f) Meminta informasi mengenai sumber bahan baku (gabah/beras), apa berasal dari petani/poktan/gapoktan atau dari tengkulak/pedagang, serta kemana aliran produksi dari usaha penggilingan tersebut, ke pedagang/kerjasama dengan bulog atau yang lainnya; serta lokasi/daerah sumber bahan baku dan lokasi/daerah tujuan aliran gabah/beras;
- g) Usaha apa saja yang dijalankan dipenggilingan tersebut, berapa jumlah karyawannya (usaha kecil/sedang/besar).

Kegiatan monitoring akses pangan dilakukan langsung ke penggilingan di beberapa provinsi yaitu Provinsi Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur.

3) Pengolahan dan Penyusunan Laporan

– Pengolahan Data

Berikut tahapan pengolahan data monitoring akses pangan :

- (1) Stok Per Akhir Bulan Per Kapasitas Per Kabupaten;
- (2) Stok Provinsi Per Akhir Bulan Per Kapasitas;
- (3) Rata-rata stok akhir bulan per penggilingan;
- (4) Jumlah stok gabah/beras sampel tiap akhir bulan per provinsi;
- (5) Stok gabah/beras tiap akhir bulan berdasarkan kapasitas per provinsi;
- (6) Stok gabah/beras di penggilingan tiap akhir bulan per provinsi;
- (7) Stok gabah/beras tiap akhir bulan di penggilingan Indonesia.

– Hasil Monitoring akses pangan di tingkat penggilingan

- (1) Presentase Jumlah Penggilingan yang masuk

Rata-rata presentase jumlah penggilingan yang masuk sebesar 34,2% per bulan. Dengan presentase tertinggi sebesar 48,7% di bulan Januari, serta dengan presentase terendah di bulan Desember sebesar 26,8%. Berikut jumlah penggilingan yang masuk tiap bulan pada kegiatan monitoring akses pangan tahun 2014 :



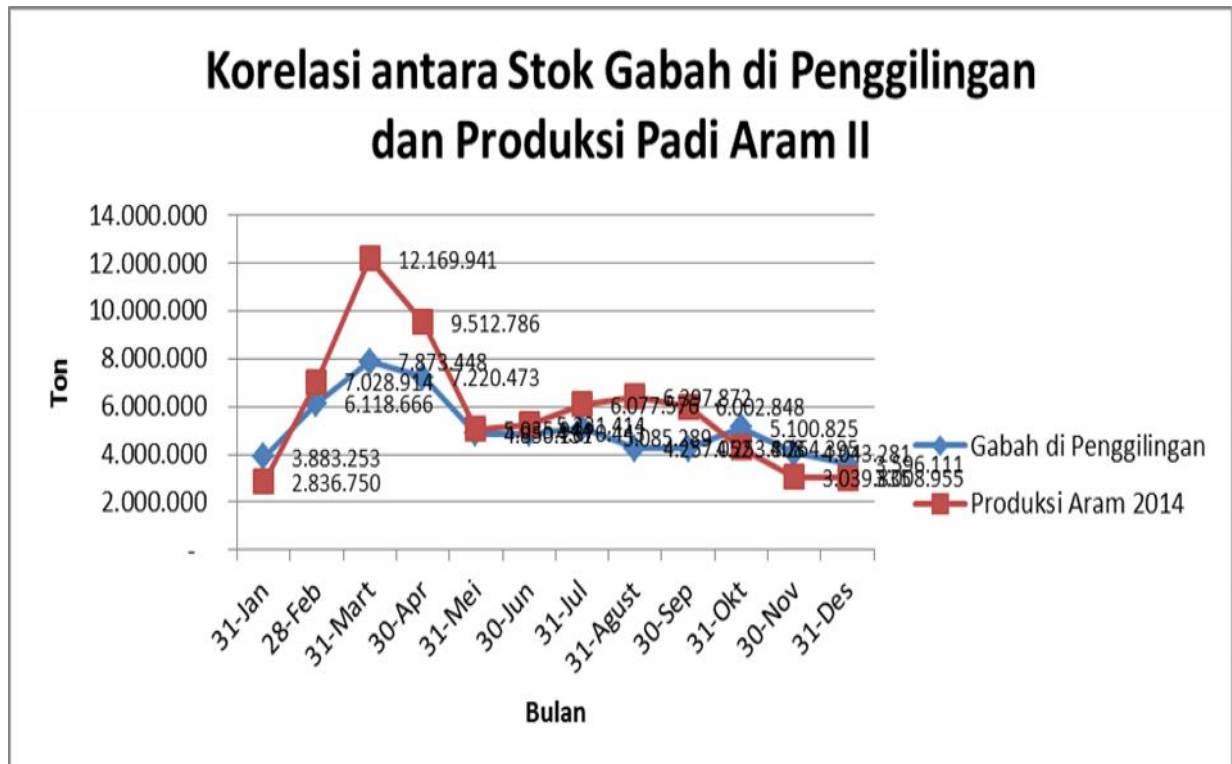
- (2) Stok Gabah Dan Beras Di Penggilingan Pada Setiap Akhir Bulan Tahun 2014

Stok gabah tertinggi terdapat pada bulan Maret yaitu sebesar 4.306.989 ton, dan stok terendah terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu sebesar 2.168.226 ton. Stok beras tertinggi juga terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 2.237.596 ton, dan stok terendah pada bulan Desember yaitu sebesar 584.060 ton. Apabila dilihat dari pola panen, pada bulan Maret memang merupakan puncak panen raya dan pada bulan Desember umumnya adalah awal musim tanam. Berikut data stok gabah dan beras di penggilingan pada setiap akhir bulan tahun 2014 :



(3) Korelasi Antara Stok Gabah Di Penggilingan Dan Produksi Padi Aram II Tahun 2014

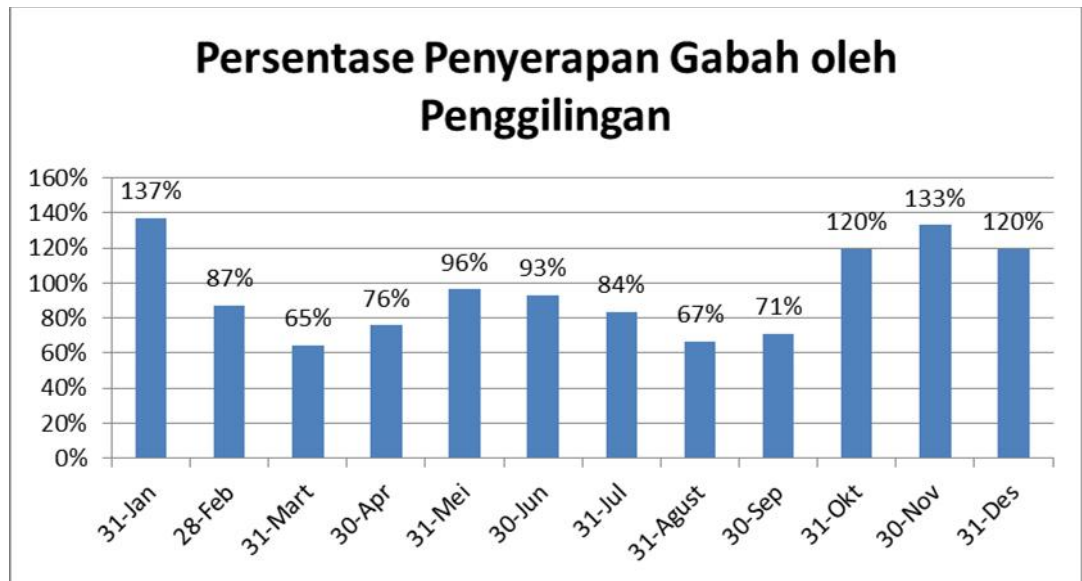
Berdasarkan hasil survey kegiatan monitoring akses pangan di penggilingan ini terdapat hubungan yang signifikan antara produksi padi dengan stok gabah dan beras yang ada di penggilingan di suatu wilayah. Hasil uji statistik, menunjukkan bahwa nilai korelasi antara stok gabah di penggilingan dengan data produksi padi aram II tahun 2014 adalah sebesar 0.92. Hal ini berarti bahwa, semakin tinggi jumlah produksi padi maka semakin tinggi pula stok gabah di penggilingan.



(4) Persentase Stok Gabah dan Beras dibanding Produksi

Penyerapan gabah oleh penggilingan di suatu wilayah berbanding lurus dengan produksi di wilayah tersebut. Hubungan antara produksi di suatu wilayah dan stok gabah yang ada di penggilingan juga dapat dilihat dari besarnya presentase stok gabah di penggilingan dibandingkan dengan besarnya produksi.

Pada bulan Januari, Oktober, November dan Desember 2014 stok gabah dan beras di penggilingan melebihi jumlah produksinya, hal ini diduga karena para pengusaha biasanya telah menyimpan cadangan gabah untuk musim paceklik sehingga pada saat produksi padi rendah mereka tetap bisa menjalankan usahanya.



Rata-rata presentase stok gabah dan beras di penggilingan setiap bulan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan angka produksi Aram II Tahun 2014 adalah sebesar 96%. Berikut tabel produksi dan stok gabah yang ada di penggilingan di Indonesia dari bulan Januari hingga Desember 2014.

Perbandingan Produksi Padi Aram II dan Stok Gabah di Penggilingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Bulan	Produksi Padi (Ton)	Stok Gabah di Penggilingan (Ton)
Januari	2.836.750,04	3.883.253,47
Februari	7.028.914,23	6.118.666,08
Maret	12.169.940,81	7.873.448,08
April	9.512.785,92	7.220.472,71
Mei	5.035.944,20	4.850.130,92
Juni	5.231.414,46	4.870.442,84
Juli	6.077.576,12	5.085.289,03
Agustus	6.397.872,22	4.257.051,82
September	6.002.848,39	4.253.807,69
Oktober	4.264.395,01	5.100.825,00
November	3.039.834,56	4.043.280,89
Desember	3.008.955,03	3.596.111,24

5. Penguatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat

a. Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan

Kegiatan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kemampuan aparat daerah dalam melakukan analisis ketersediaan pangan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Sasaran dari kegiatan ini

adalah meningkatnya kemampuan aparat daerah dalam melakukan analisis ketersediaan pangan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Sedangkan output dari kegiatan ini adalah terlaksananya apresiasi analisis ketersediaan pangan atau terealisasi 100 persen.

Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan Tahun 2014 dilaksanakan dua kali pertemuan yaitu: (1) Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 11 – 14 Maret 2014 yang diikuti oleh 60 orang peserta dari 17 provinsi; (2) Makasar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 – 21 Maret 2014 yang diikuti oleh 32 orang dari 15 provinsi. Materi yang disampaikan dalam Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan adalah Neraca Bahan Makanan (NBM), Angka Kecukupan Gizi dan Pola Pangan Harapan (AKG & PPH), Pola Panen Bulanan, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil diskusi dengan peserta adalah:

- a. Penyusunan NBM provinsi dan/atau kabupaten/kota dapat dilakukan melalui tim NBM berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur dan/atau bupati/walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- b. Pengisian data dalam NBM bisa melalui pendekatan-pendekatan perhitungan statistik apabila ada data yang tidak tersedia dengan tidak merubah format tabel.
- c. Sumber data untuk menyusun NBM diperoleh dari instansi teknis terkait sehingga NBM dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja instansi terkait tersebut yang berperan sebagai sumber data dan informasi NBM.
- d. Format tabel dan metode penghitungan dalam NBM mengacu pada metode dari FAO sehingga kolom-kolom pada tabel NBM yang ada sekarang tidak dapat dihilangkan jika datanya tidak tersedia terus menerus
- e. Mulai tahun 2014 disepakati menggunakan rekomendasi WNPG X tahun 2012, AKE tingkat konsumsi sebesar 2.150 kal/kap/hari dan AKP sebesar 57 gram/kap/hari, sedangkan AKE tingkat ketersediaan sebesar 2.400 kal/kap/hari dan AKP sebesar 63 gram/kap/hari.
- f. Provinsi /Kabupaten/Kota dapat menyusun Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai dengan kondisi potensi wilayah, khususnya di wilayah non sentra produksi beras atau wilayah dengan konsumsi pangan pokok selain beras.
- g. Untuk menghitung produksi bulanan tahun berjalan dibutuhkan data produksi beberapa tahun ke belakang untuk melihat polanya, yaitu periode dimana terjadi puncak produksi dan periode dimana terjadi paceklik, dengan catatan tidak ada kejadian bencana luar biasa.

- h. Koefisien dan selang waktu peningkatan penyediaan pangan menjelang HBKN dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah (Provinsi/Kabupaten).
- i. Permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dalam menyusun analisis ketersediaan pangan antara lain:
- Kurangnya SDM atau aparat yang menangani analisis ketersediaan pangan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan analisis ketersediaan pangan.
 - Tim NBM wilayah belum dibentuk sehingga sulit untuk berkoordinasi lintas instansi dalam hal pengumpulan data.
 - Belum adanya angka konversi wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang lebih bisa menggambarkan kondisi wilayah setempat.
 - Tidak tersedianya data seperti produksi, stok pangan, ekspor-impor, industri dan data pendukung lainnya.
 - Angka konversi yang digunakan perlu diperbaharui khususnya untuk provinsi atau kabupaten sehingga mempunyai angka konversi sendiri yang lebih bisa menggambarkan kondisi wilayah.
 - Banyak komoditas atau jenis pangan lokal yang belum masuk dalam NBM padahal komoditas tersebut merupakan potensi wilayah.
 - Belum dimanfaatkannya hasil analisis ketersediaan pangan sebagai dasar mengambil kebijakan.
 - Kurangnya dukungan dana APBD untuk kegiatan analisis ketersediaan pangan padahal capaian ketersediaan energi menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan yang harus dipenuhi berdasarkan Permentan No. 65 tahun 2010.

b. Apresiasi SKPG

Pertemuan ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan pejabat/aparat dalam menganalisis situasi pangan dan gizi di wilayahnya melalui SKPG. Pertemuan ini dilaksanakan dua tahapan: (a) pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam Analisis SKPG I dilaksanakan pada tanggal 26-28 Februari 2014 di Hotel Grand Ussu Bogor yang dihadiri oleh dari 14 (empat belas) propinsi, kabupaten/kota; dan (b) pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam Analisis SKPG II dilaksanakan pada tanggal 5-7 Maret 2014 di The Jayakarta Hotel and Spa DI. Yogyakarta peserta

dari 17 (tujuh belas) provinsi, kabupaten/kota. Hal-hal prinsip yang ditegaskan kembali agar peserta makin memahami SKPG, yaitu :

- a) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran SKPG, diharapkan lebih mengoptimalkan fungsi TIM Pokja SKPG, sehingga Gubernur/Bupati/Walikota dapat menggunakan analisis SKPG sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan;
 - b) Perlu dibuat alternative indikator analisis SKPG untuk wilayah yang memiliki kekhususan, seperti: (a) daerah perbatasan dengan perkotaan, kepulauan, Maluku dan Papua; (b) daerah tertentu dimana komoditas pangan yang dipakai dalam analisis tidak dikonsumsi masyarakat setempat. Selanjutnya penyempurnaan indikator akan dibahas pada saat revisi Permentan di 2015.
 - c) Pada laporan hasil analisis SKPG, perlu ditambahkan data pendukung lain yang dapat mendeskripsikan gambaran sebenarnya pada wilayah tersebut, sehingga hasil komposit dari analisis SKPG dapat dijelaskan secara lengkap dan diberikan justifikasi;
 - d) Perlu adanya reward dan punishment bagi daerah pelaksana kegiatan SKPG, yang didasarkan pada: (a) pengiriman laporan SKPG oleh kabupaten/kota dan provinsi kepada BKP pusat secara rutin; (b) realisasi anggaran baik dana TP maupun dana dekonsentrasi;
 - e) Dalam rangka penanganan daerah rawan pangan, daerah diharapkan mengalokasikan anggaran analisis dan penanganan kerawanan pangan, hal ini disebabkan tidak adanya alokasi dana APBN untuk intervensi penanganan daerah rawan pangan.
- c. Peningkatan Kapasitas Petani

Tujuan dari kegiatan peningkatan kapasitas petani adalah meningkatkan kemampuan petani dan pelaku usaha on/off farm serta pengurus dan anggota lembaga ekonomi pedesaan dalam menjalankan usahanya berdasarkan potensi lokal secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya antara lain : 1). Mengembangkan kemampuan peserta dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam bagi terciptanya kehidupan yang berkelanjutan; 2). Mendorong petani untuk lebih mandiri dalam menjalankan usahanya baik di bidang pertanian maupun peternakan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lingkungan yang ada; 3). Memberikan pemahaman pentingnya peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan

untuk mendorong tumbuhnya usaha-usaha produktif di pedesaan secara berkelanjutan; 4). Meningkatkan peran dan fungsi LKD untuk memfasilitasi pengembangan perekonomian pedesaan; 5). Meningkatkan wawasan dan pengetahuan petani dan pengurus LKD tentang manajemen usaha yang sehat dan menguntungkan; serta 6). Meningkatkan kesejahteraan petani.

Kegiatan peningkatan kapasitas petani dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu di Magelang (Jawa Tengah), Bandar Lampung (Lampung), dan Malang (Jawa Timur).

1) Peningkatan Kapasitas Petani di Magelang (Jawa Tengah)

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petani dilaksanakan pada tanggal 19 - 21 Mei 2014 di Grand Artos Aerowisata Hotel, Magelang, Jawa Tengah. Peserta pertemuan sebanyak 50 orang pelaku usaha on dan off farm dari Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Garut), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Semarang, Brebes, dan Salatiga), serta provinsi DI Yogyakarta (Kab. Bantul dan Kulon Progo).

Narasumber dan materi yang disampaikan pada pertemuan ini yaitu:

- Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Indonesia: Filosofi, Potensi, dan Tantangannya oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- Penguatan Modal kelompok oleh Ir. Idawati Mursidah, M.Si dan Anjani Amitya Kirana
- Mewujudkan Usaha Peternakan yang Menguntungkan : Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan oleh. Ir. Bambang Sugianto, M.Si.
- Pemanfaatan Lahan Marjinal” oleh Sukarman
- Mandiri dalam penyediaan benih, mengurangi ketergantungan petani pada pihak lain oleh Warsiyah dan Siti Tarbiah, MP.

Hasil dari pertemuan peningkatan kapasitas petani di Magelang, Jawa tengah dirumuskan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

- Kemandirian (Kedaulatan, Kemuliaan/dignity), termasuk kemandirian petani, seyogyanya menjadi platform bersama dalam membangun bangsa dan pertanian. Kemandirian diartikan sebagai tersedianya banyak pilihan sehingga masyarakat, dan petani, memiliki pilihan dalam menjalani penghidupan (livelihood)-nya supaya monopoli diminimalisir, baik oleh perorangan, apalagi oleh negara.
- Ketahanan pangan tidak dapat diletakkan pada tingkat individu, tetapi minimal harus diletakkan pada tingkat kemasyarakatan/community. Ketahanan pangan bukan kondisi tetapi kemampuan orang per orang
- Pemenuhan konsumsi Pangan bagi masyarakat harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, paling tidak terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan meliputi:
 - (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal,
 - (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat,
 - (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Koperasi di tanah air masih nampak belum berarti, hal ini oleh kurangnya keterpaduan diantara mereka oleh karena itu perlu adanya dorongan dan motivasi untuk segera membentuk jaringan kerja sama sehingga dapat menjangkau usah berskala besar. Agar posisi dan peran koperasi tumbuh semakin kuat maka disamping dibentuknya jaringan kerja sama dalam gerakan koperasi sendiri, perlu dikembangkan kerja sama dengan sektor swasta dan BUMN sebagai sesama pelaku ekonomi dengan prinsip saling menguntungkan.
- Pengelolaan lahan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan lahan harus diupayakan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan maupun menurunkan kualitas sumber daya lahan, dan sebaiknya diarahkan pada perbaikan struktur fisik, komposisi kimia, dan aktivitas biota tanah yang optimum bagi tanaman.
- Lahan marginal adalah lahan yang memiliki beberapa faktor pembatas yang harus diatasi terlebih dahulu sebelum lahan tersebut dimanfaatkan. Lahan

setelah mendapatkan pengelola lebih dahulu. Pengelolaan yang digunakan untuk lahan marginal adalah rekayasa teknologi, bahan organik, dan irigasi spesifik lokasi.

- Untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan secara menyeluruh perlu ada keseriusan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya petani yang ada di tingkat bawah.

2) Peningkatan Kapasitas Petani di provinsi Lampung

Peningkatan Kapasitas Petani dilaksanakan pada hari Jum'at – Sabtu tanggal 13 – 14 Juni 2014 di Amalia Hotel, Bandar Lampung. Peserta pertemuan 33 orang pengurus LKD dari 11 Kabupaten di Provinsi Lampung.

Materi dan narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas petani di provinsi Lampung sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- Membangun landasan kemandirian pangan oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- Mekanisme pengajuan LKD menjadi lembaga Berbadan Hukum (Koperasi) oleh Ir. Pahala Tampubolon, MM (Kepala UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM, Diskoperindag Provinsi Lampung).
- Penguatan Kelembagaan Lembaga Keuangan Desa (LKD) oleh Ir. Ratna Kusuma Dewi.
- Penguatan Finansial Kelompok oleh Anjani Amitya Kirana
- Analisa Usaha Tani oleh Ir. Mewa Ariani, M.Si (Peneliti Utama, PSE-KP)

Hasil dari pertemuan Peningkatan Kapasitas Petani di Provinsi Lampung di rumuskan sebagai berikut:

- Kegiatan peningkatan kapasitas petani melalui penguatan lembaga keuangan desa (LKD) yang melibatkan para aparat dan pengurus LKD untuk memahami aktivitas perekonomian di lingkungan masyarakat setempat serta memahami pengelolaan keuangan dan kewirausahaan dengan baik.
- Atas dasar itu fungsi LKD sangat penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan perekonomian masyarakat.
- Dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Terkait dengan hal itu sebagai lembaga, pengurus

~~dan anggotanya dituntut untuk memahami aktivitas perekonomian di~~

lingkungan masyarakat setempat serta memahami pengelolaan keuangan dan kewirausahaan dengan baik.

- Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas LKD baik pengurus maupun anggotanya, fungsi dan peran LKD dapat berjalan baik, hal tersebut akhirnya dapat tercermin dari peningkatan pelayanan LKD dan aktifitas ekonomi keluarganya, dan harapannya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat.
- Setelah pertemuan ini, dengan koordinasi dengan provinsi akan dilakukan :
 - Inventaris ulang terhadap LKD-LKD yang tidak baik dengan melakukan penilaian kinerjanya;
 - Mengundang semua Tim Pangan Desa dan kelompok afinitas untuk rapat LKD untuk consensus bersama kekayaan dan dana yang ada di masing-masing LKD dan membuat aturan baru sesuai dengan kesepakatan hasil rapat;
 - Uang yang masih ada di kelompok afinitas ditarik untuk dimasukkan ke LKD, karena masih ada dana yang tertahan dan digulirkan hanya seputar kelompok afinitas bersangkutan, akibatnya uang tidak pernah setor ke LKD;
 - Pembagian uang ke kelompok afinitas, setelah kelompok afinitas membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK).

3) Peningkatan Kapasitas Petani Malang, Jawa Timur

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petani dilaksanakan pada 24 - 26 September 2014 di Hotel Antariksa, Malang, Jawa Timur. Peserta pertemuan sebanyak 50 orang terdiri dari pelaku usaha on/off farm dan pengurus LKD dari Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Indramayu), Jawa Tengah (Kabupaten Magelang), DI Yogyakarta (Kabupaten Bantul), dan Jawa Timur (Kabupaten Pamekasan, Bondowoso, Pacitan, Bojonegoro, Sumenep, Sampang, Bangkalan, Probolinggo, Jember, Situbondo, Jombang, Banyuwangi, Malang, dan Nganjuk).

Narasumber dan Materi yang disampaikan pada pertemuan peningkatan kapasitas petani di Malang yaitu:

- Membangun Landasan Kemandirian Pangan oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

- Pemanfaatan Mikroba untuk Pertanian dalam arti luas” oleh Bapak Dr. Hery Budianto, Bapak Dr. Anton Muhibuddin, dan Bapak Gatot Indroyono.
- Proses dan tahapan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro menjadi Lembaga Berbadan Hukum oleh Bapak Nanang Winarno, SE, MM
- Study Banding (Field Trip) ke LKMA GPT Mulyajaya.
- Pembentukan Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro oleh Bapak Ali Hamdan S.Si, MEI dari Pusat KJKS Jawa Timur dan Bapak Puspito dari LKMA Nganjuk.
- Penyediaan dan Pengembangan Modal Usaha secara Mandiri oleh Bapak Rokhi dan Bapak Warsiyah.
- Perencanaan usaha oleh Bapak Ahmad Jaeroni

Hasil Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petani Di Malang, Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut:

- Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamatkan tentang Penyelenggaraan Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri; menyediakan menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.
- Kebijakan mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan harus didasari pada penghargaan terhadap individu dengan menempatkan petani/orang sebagai pelaku utama yang harus dilayani, dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraan hidupnya. Tidak ada resep ataupun formula mujarab yang dapat dipakai untuk menangani persoalan pangan dan kesejahteraan petani, namun yang pasti peningkatan martabat dan kesejahteraan petani harus dilakukan melalui pendidikan yang dapat mencerdaskan kehidupan petani.

- Kemandirian (Kedaulatan, Kemuliaan/dignity), termasuk kemandirian petani, seyogyanya menjadi platform bersama dalam membangun bangsa dan pertanian. Kemandirian diartikan sebagai tersedianya banyak pilihan sehingga masyarakat, dan petani, memiliki pilihan dalam menjalani penghidupan (livelihood)-nya supaya monopoli diminimalisir, baik oleh perorangan, apalagi oleh negara.
- Dalam usaha pertanian ada 5 (lima) unsur dasar yang harus dipenuhi yaitu: 1) Lahan yang didalamnya terkandung pengertian tempat tumbuh serta penyedia nutrisi bagi hidup dan berkembangnya tanaman, 2) Benih, 3) Air, 4) Sinar Matahari, dan 5) Manusia. Kelima unsur tersebut tersedia melimpah di Indonesia, sehingga bukan sesuatu yang sulit bagi negeri ini untuk memproduksi pangan bagi penduduknya.
- Pertanian ramah lingkungan dapat didefinisikan sebagai: Pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan kelestarian lingkungan, ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian, guna memperoleh hasil panen optimal yang aman dan berkelanjutan
- Pemanfaatan teknologi mikroba di bidang pertanian dapat meningkatkan fungsi mikroba indigenous (asli alamiah) dalam berbagai sistem produksi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- LKD Demapan adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok bersama kelompok afinitas di Desa Mandiri Pangan untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif pedesaan. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian di pedesaan. LKD Demapan merupakan instrument yang memberikan pelayanan pinjaman permodalan kepada Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif di pedesaan yang umumnya pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.
- Mengingat fungsi dan peran LKD dalam peningkatan kapasitas masyarakat desa khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat yang cukup besar maka berbagai upaya perlu dilakukan untuk penguatan lembaga ini, tidak semata-mata tergantung pada kegiatan-kegiatan yang telah di rencanakan dalam program aksi demapan saja tetapi perlu juga dilakukan secara crash programme diluar jalur jadwal palang yang konvensional baik berupa apresiasi, workshop maupun bentuk-bentuk pendampingan lainnya.

- Fungsi LKD yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan perekonomian masyarakat menuntut pengurus dan anggotanya memahami aktifitas perekonomian di lingkungan masyarakat setempat serta manajemen pengelolaan keuangan dan kewirausahaan dengan baik.
- Berdasarkan Undang – undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro bahwa lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat harus berbadan hukum. Sehingga LKD Demapan yang memiliki usaha simpan pinjam diharapkan pada awal tahun 2015 sudah memiliki badan hukum.
- Permasalahan yang umum dihadapi oleh petani di Indonesia adalah sulitnya mencari modal usaha, umumnya mereka sulit meminjam ke bank karena persyaratan yang terlalu ribet dan akhirnya mereka terjerumus dalam jeratan rentenir. Oleh sebab itu, sebaiknya petani dapat mandiri tanpa tergantung terhadap pihak lain dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sehingga diharapkan petani dapat memiliki lembaga keuangan sendiri (dari petani, oleh petani, dan untuk petani), melepas ketergantungan dari pihak lain, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- Dalam merencanakan usaha hal-hal yang harus diketahui adalah bagaimana cara mengidentifikasi peluang dan sumber bisnis di wilayah mereka, cara menilai peluang bisnis yang paling diminati, serta cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peluang dan ancaman bisnis yang akan dijalankan.

Membangun ketahanan pangan masyarakat seharusnya memperluas partisipasi dan dapat memobilisasi seluruh komponen masyarakat dengan memberi edukasi, dorongan dan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan aset/sumberdaya setempat secara cerdas, dimana masyarakat akhirnya dapat memilih berbagai alternatif dalam mengelola penghidupannya secara bijaksana.

3.4 Capaian Kinerja Lainnya

1. Pemanfaatan Dana Hibah Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)

Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan telah mendapat penghargaan dari Arab Gulf Programme for Development (AGFUND) International Prize, untuk kategori 3, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam pengembangan ide-ide inovatif dan adopsi program perintis, kebijakan dan operasionalisasi/pengalaman yang baik (policies and good practices) untuk mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat miskin, dan berhak atas hadiah berupa hibah sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu US Dollar).

Dana hibah yang diperoleh dari AGFUND akan digunakan sebagai pilot project untuk membantu pengembangan Desa Mandiri Pangan pada tahap berikutnya, yaitu memperkuat dan memperluas ekonomi produktif berbasis sumberdaya lokal dan kegiatan pertanian dalam arti luas beserta turunannya melalui penguatan Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Desa Mandiri Pangan yang pernah mendapatkan penghargaan ketahanan pangan/Adhikarya Pangan Nusantara, yaitu Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta.

Dalam menunjang pelaksanaan pemanfaatan dana hibah AGFUND, telah dilakukan sosialisasi sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan baik dilakukan oleh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Beberapa hal yang telah dipantau adalah mengenai : kelengkapan administrasi, dokumen operasional berupa Pedoman Pelaksanaan, Petunjuk Teknis (Juknis), dan persiapan pelaksanaan pemanfaatan dana hibah AGFUND.

Tujuan pemanfaatan dana hibah AGFUND : untuk membantu pengembangan Desa Mandiri Pangan pada tahap berikutnya, yaitu memperkuat dan memperluas ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kegiatan pertanian dalam arti luas termasuk kegiatan turunannya melalui penguatan Lembaga Keuangan Desa (LKD) di desa yang pernah mendapatkan penghargaan ketahanan pangan/Adhikarya Pangan Nusantara.

Sasaran penyaluran dana hibah AGFUND adalah Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta dan Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Hibah AGFUND

- b. Sosialisasi Kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan konsep dan pemahaman dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah AGFUND.
- 1) Sosialisasi Pedoman Pelaksana dana Hibah AGFUND bertujuan untuk menyamakan konsep dan pemahaman dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah AGFUND. Sosialisasi telah dilaksanakan di Semarang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Maret 2014 dan di Yogyakarta tanggal 24 Maret 2014 dengan dihadiri pejabat/petugas dari Badan/Unit Kerja Ketahanan Pangan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten, anggota LKD Desa Naka Mura dan LKD Munthuk Lestari dan LKD-LKD sekitarnya, dengan narasumber Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 - 2) Sosialisasi Pemanfaatan Dana Hibah AGFUND di LKD Naka Mura Kabupaten Magelang pada tanggal 2 April 2014, dengan narasumber Tim dari BKP Kementerian Pertanian, berdasarkan hasil diskusi disimpulkan sebagai berikut:
 - Jenis Usaha Kelompok adalah: pertanian tanaman pangan, hortikultura, ternak kambing, pembudidaya ikan, bakulan/dagang, dan industri rumah tangga pertanian.
 - Dana akan digunakan untuk penguatan modal bagi masyarakat yang usahanya sudah berjalan dan perluasan usaha produktif pertanian dan memaksimalkan potensi yang ada di wilayah LKD Naka Mura sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di kabupaten Magelang.
 - Sesuai dengan usulan kelompok, LKD sudah mengajukan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebesar Rp.548.000.000,-, dan sudah diverifikasi oleh Tim Kabupaten. Untuk selanjutnya diusulkan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
 - 3) Sosialisasi Pemanfaatan Dana Hibah AGFUND di LKD Munthuk Lestari Kabupaten Bantul pada tanggal 2 April 2014, dengan narasumber Tim dari BKP Kementerian Pertanian, berdasarkan hasil diskusi disimpulkan sebagai berikut:
 - Jenis Usaha Kelompok : Pertanian tanaman pangan, peternakan (sapi, kambing, ayam), pengolahan hasil pertanian, mebel dan kerajinan bamboo, pedagang sembako, pedagang kerajinan, pedagang olahan.
 - Dana akan digunakan untuk penguatan modal bagi masyarakat yang usahanya sudah berjalan dan perluasan usaha produktif pertanian pada khususnya dan usaha-usaha produktif non pertanian.

- LKD sudah mengusulkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebesar Rp. 548.000.000. sudah diverifikasi di kelompok sudah, namun belum diverifikasi oleh Tim Kabupaten.
 - Pemanfaatan dana hibah AGFUND semula diperuntukkan untuk usaha pertanian 70% dan non pertanian 30%. Sementara itu anggota kelompok LKD Munthuk Lestari sebagian besar merupakan pengrajin, sehingga apabila pemanfaatannya lebih besar untuk usaha produktif pertanian dikhawatirkan tingkat kegagalannya tinggi (resiko tinggi). Sehingga disepakati bahwa dana hibah tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat dan memperluas ekonomi produktif berbasis sumberdaya lokal dan kegiatan pertanian dalam arti luas beserta turunannya
- 4) Sosialisasi Penyusunan AD/ART LKD dan Pembentukan Koperasi di LKD Madukoro pada tanggal 25 Juni 2014 oleh BKP Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi Kabupaten Magelang dan BPPKP Kabupaten Magelang di Desa Madukoro pada tanggal 25 Juni 2014.
 - 5) Sosialisasi Penyusunan AD/ART LKD Munthuk Lestari pada tanggal 2 Juni 2014 di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bantul.

c. Pencairan Dana Hibah AGFUND

- 1) Dana hibah AGFUND sebesar US \$ 100.000 sudah ditransfer ke rekening Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, dengan nama rekening Prize or Village Food Resilience Program tanggal 3 Februari 2014. Dana tersebut sebesar US \$ 90.000 akan dialokasikan untuk LKD Naka Mura, Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan LKD Munthuk Lestari, Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta masing-masing sebesar US \$ 45.000 atau setara dengan Rp. 548.454.542,5 (Lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua koma lima rupiah).
- 2) Untuk mendukung pemanfaatan dana hibah AGFUND manajemen proyek di pusat, sebesar US \$ 10.000, tetapi belum ditransfer ke rekening Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, untuk kegiatan: administrasi, pengendalian, monitoring, pembinaan, evaluasi dan pelaporan. Saat ini sudah dibuat surat Permohonan Pencairan Dana Manajemen Proyek AGFUND ke

Direktur Departemen Proyek-AGFUND.

- 3) Rekapitulasi RUK yang sudah diverifikasi dan disetujui oleh ketua LKD, pendamping, dan Tim Pangan Desa, serta diketahui oleh Kepala Desa, penyuluh BP3K atau unit/kelembagaan penyuluh kecamatan, aparat dari Badan /Unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten dan provinsi, diusulkan kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan ditembuskan kepada Badan/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten dan Provinsi. Usulan RUK LKD Desa Madukoro senilai Rp. 568.158.500,- (Lima ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) untuk 4 (empat) kelompok, dan LKD Desa Munthuk senilai Rp. 548.000.000,- (Lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk 17 (tujuh belas) kelompok.
- 4) Usulan RUK yang diajukan oleh LKD Desa Madukoro dan LKD Desa Munthuk setelah diverifikasi oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian disetujui senilai Rp.1.091.618.500, yaitu LKD Nakamura Rp.547.938.500,- dan LKD Munthuk Lestari Rp.543.680.000, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Verifikasi RUK LKD Naka Mura

No	Nama Kelompok	Jenis Kegiatan/ Usaha	Usulan RUK	Persetujuan RUK
			Biaya (Rupiah)	Biaya (Rupiah)
1	2	3		5
1.	Maju Lestari	- Ternak Kambing	194.000.000,-	190.800.000,-
		- Bakulan	50.000.000,-	50.000.000,-
		- Bakula (B)*	20.158.500,-	20.158.500,-
		- Budidaya Ikan	91.200.000,-	89.480.000,-
2.	Ngudi Mina	- Tanaman Pangan	69.000.000,-	54.500.000,-
3.	Rekso Bantolo	- Hortikultura	62.000.000,-	62.000.000,-
4	KWT Bukit Madu	- Olahan Pangan	81.000.000,-	81.000.000,-
Jumlah			568.158.500,-	547.938.500,-

*RUK susulan

Tabel 8. Hasil Verifikasi RUK LKD Munthuk Lestari

No.	Nama Kelompok	Jenis Kegiatan/ Usaha	Usulan RUK Biaya (Rupiah)	Persetujuan RUK Biaya (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	Maju Lancar	Dagang olahan pangan, mebel kayu, warung sembako	34.000.000,-	34.000.000,-
2	Karya Mandiri	ternak kambing, kerajinan bambu, dagang kerajinan	45.000.000,-	45.000.000,-
3	Mekarsari	Ternak ayam, kerajinan bambu, dagang mebel kayu	31.000.000,-	31.000.000,-
4	Mugi Rahayu	Ternak ayam telur, kerajinan bambu, warung sembako	30.300.000,-	30.300.000,-
5	Sido Mulyo	Kerajinan bambu, ternak sapi, ternak kambing, warung sembako	21.850.000,-	21.850.000,-
6	Sumber Makmur	ternak kambing, kerajinan bambu, mebel kayu	40.400.000,-	40.400.000,-
7	Sido Maju	tanaman padi	26.000.000,-	25.550.000,-
8	Sayuk Rukun	Mebel kayu, kerajinan bambu, ternak kambing	34.300.000,-	34.300.000,-
9	Margo Lele	Perikanan lele, dagang pintu, kerajinan bambu	31.950.000,-	31.950.000,-
10	Srikaton	ternak kambing, kerajinan bambu, dagang sayur, pembuat tempe	25.000.000,-	25.000.000,-
11	Ngliseng Bangkit	Kerajinan bambu	20.000.000,-	20.000.000,-
12	Maju Mandiri	ternak kambing, kerajinan bambu	36.500.000,-	36.500.000,-
13	Sedyo Mukti	ternak sapi, kerajinan bambu, dagang, dagang kerajinan, pembuat arang	29.500.000,-	29.500.000,-
14	Sido Rahayu	Mebel, ternak sapi, kerajinan bambu, warung sembako	41.200.000,-	41.200.000,-
15	Sido Makmur	Pertanian tanaman padi	30.000.000,-	26.130.000,-
16	Muntuk Bersinar	ternak kambing, ternak sapi, kerajinan bambu, warung sembako	47.800.000,-	47.800.000,-

17	Tangkil Berkarya	Ternak kambing, kerajinan bambu, mebel kayu, warung	23.200.000,-	23.200.000,-
Total			548.000.000,-	543.680.000,-

- 5) Berdasarkan persetujuan Plh. Kepala Badan/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mentransfer dana hibah AGFUND dari rekening Prize or Village Food Resilience Program kepada rekening LKD Naka Mura pada Bank BRI Simpedes No. Rek : 6799-01-011179-53-0 dan LKD Munthuk Lestari pada Bank BRI Simpedes No Rek : 6633-01-010460-53-0.
- 6) Sesuai hasil verifikasi RUK yang telah disetujui, total dana yang sudah ditransfer sebesar Rp. 1.091.618.500,- (Satu milyar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan belas delapan belas ribu lima ratus rupiah) atau 99,52 persen dari total alokasi dana hibah AGFUND dengan rincian sebagai berikut :
- a) LKD Naka Mura senilai Rp. 547.938.500,- (Lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada tanggal 20 Agustus 2014 ditranfer ke rekening LKD Naka Mura senilai Rp. 527.780.000,- (Lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2014 senilai Rp. 20.158.500,- (Dua puluh juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditransfer
- b) LKD Munthuk Lestari senilai Rp. 543.680.000,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 7) Sisa Dana hibah AGFUND yang sudah ditransfer ke rekening Prize or Village Food Resilience Program yang tidak dimanfaatkan senilai Rp.5.290.585,00 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) telah disetor ke Kas Negara
- 8) Sementara itu, dana hibah AGFUND senilai US \$ 10.000 untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan dana hibah AGFUND , yaitu untuk manajemen proyek antara lain: administrasi, pengendalian, monitoring, pembinaan, evaluasi dan pelaporan sampai saat ini belum ditransfer ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melalui Rekening Prize or Village Food Resilience Program..
- 9) Perkembangan Pemanfaatan Dana Hibah AGFUND di LKD Naka Mura
- a) Dana hibah AGFUND yang diterima oleh LKD Naka Mura melalui rekening Bank BRI Simpedes No. Rek : 6799-01-011179-53-0. pada tanggal 20

Agustus 2014 senilai Rp. 547.938.500,- (Lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Pencairan dana hibah AGFUND oleh LKD Nakamura sampai awal Maret 2015 sudah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali. senilai Rp. 382.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah). Sisa dana di rekening LKD senilai Rp. 154.938.500,00,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan di Kas LKD senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah). Waktu pencairan dan jumlah nominal dana yang dicairkan secara rinci sebagai berikut:

- b) Perkembangan modal usaha dari dana hibah AGFUND yang dikelola oleh LKD Naka Mura Desa Madukoro Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang belum terlihat secara signifikan karena baru berjalan selama 3 bulan.

10) Perkembangan Pemanfaatan Dana Hibah AGFUND di LKD Munthuk Lestari

- a) Dana hibah AGFUND yang diterima oleh LKD Munthuk Lestari pada tanggal 20 Agustus 2014 senilai Rp 543.680.000,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), melalui rekening Bank BRI Unit Dlingo Nomor rekening : 6633-01-010460-53-0. Pencairan Dana Hibah AGFUND dari LKD Munthuk Lestari ke kelompok-kelompok afinitas dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
- b) Dana Hibah dari AGFUND dipinjamkan ke LKD Munthuk Lestari dan LKD Lain di Kabupaten Bantul yang telah mandiri. Jasa yang diterapkan adalah 0,5 persen setiap bulan, Jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dengan angsuran setiap 3 bulan sekali. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dari dana Rp.543.680.000,- telah berkembang menjadi RP 583.615.000,-
- c) Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya dan hibah ini adalah:
- d) Meningkatnya modal yang dapat diakses dengan mudah oleh anggota kelompok Desa Mandiri Pangan.
 - Berkembangnya usaha produktif melalui penguatan LKD dan kegiatan pertanian dalam arti luas termasuk kegiatan turunannya, yang dilaksanakan oleh kelompok Desa Mandiri Pangan
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat
 - Meningkatnya tabungan masyarakat.

Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana hibah AGFUND ini secara umum tidak ada kendala/permasalahan yang cukup berarti. Namun secara spesifik permasalahan yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut :

1) LKD Naka Mura Desa Madukoro

- Pemahaman pengurus tentang isi AD/ART yang telah disepakati oleh seluruh anggota LKD Nakamura masih kurang,
- Anggota kelompok yang meminjamkan dana di LKD Naka Mura yang berasal dari luar Desa Madukoro tidak berasal dari desa pelaksana program Desa mandiri Pangan maupun Desa Replika Mandiri Pangan.
- Usaha produktif yang dibiayai dari pinjaman dana AGFUND tidak hanya untuk sektor pertanian dalam arti luas, tetapi juga berbagai sektor usaha.
- SDM yang mengelola dana hibah AGFUND masih sangat terbatas pengetahuannya terutama dalam administrasi.

2) LKD Muntuk Lestari, Desa Muntuk

- Anggota kelompok LKD Munthuk Lestari sebagian besar merupakan pengrajin, sehingga apabila pemanfaatannya lebih besar untuk usaha produktif pertanian dikhawatirkan tingkat kegagalannya tinggi (resiko tinggi) karena tidak punya pengalaman dalam bidang pertanian.
- Untuk kelompok budidaya tanaman padi dan budidaya perikanan pencairan dana AGFUND sedikit mundur. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan dana menunggu datangnya musim hujan yang datangnya terlambat.

2. PPFS-APEC

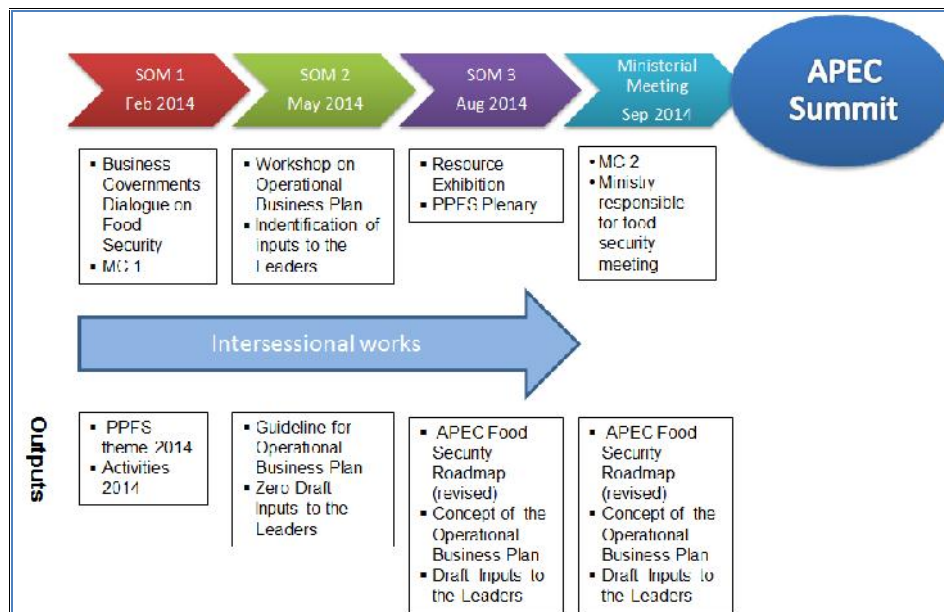
Pada tahun 2014, rangkaian kegiatan APEC PPFS diselenggarakan di Tiongkok, yang berperan sebagai tuan rumah sekaligus sebagai Ketua PPFS. Indonesia bertindak sebagai Wakil Ketua, setelah pada tahun 2013 bertindak sebagai tuan rumah sekaligus Ketua, bersama dengan Filipina. Kegiatan PPFS tahun 2014 di Tiongkok merupakan tindak lanjut dari capaian PPFS tahun 2013 di Indonesia.

Secara umum, tema APEC 2014 di Tiongkok adalah Shaping the Future through Asia-Pacific Partnership, dengan prioritas kegiatan yaitu Promoting innovative development, economic reform and growth. Secara khusus, tema PPFS 2014 adalah Strengthening Partnership for Food Security, dengan mengangkat isu utama: (1) Technology

cooperation, knowledge-sharing and capacity-building in food production; (2) Technology exchanges and cooperation in food storage, supply chain and food loss reduction; (3) Agricultural and food trade cooperation and facilitation; (4) Investment and infrastructure development and cooperation on food security; dan (5) Food standards and safety assurance.

Berdasarkan tema dan isu yang diangkat, deliverables PPFS 2014 yang diharapkan adalah: (1) Revised version of the Food Security Roadmap (version 2013); (2) Formulation of Operational Business Plan (2014-2020) for food security; dan (3) Promotion of exchanges and cooperation of technologies, facilities and resources in the agricultural, food and fisheries sectors, as well as consolidating policy partnership on food security within APEC.

Rangkaian kegiatan PPFS 2014 sesuai dengan action plan PPFS 2014 di Tiongkok adalah: (1) Pertemuan Policy Partnership on Food Security (PPFS): Government-Business Dialog Conference on Food Security and Trade dan Pertemuan First PPFS Management Council (MC) yang diselenggarakan di Ningbo pada tanggal 21-23 Februari 2014 bersamaan dengan Senior Official Meeting (SOM) 1 APEC; (2) Pertemuan Workshop Penyusunan Operational Business Plan PPFS pada tanggal 11 Mei 2014 dan Pertemuan First Senior Level Consultation on Agriculture and Food Security di Qingdao pada tanggal 12-13 Mei 2014 bersamaan dengan SOM 2 APEC; (3) Pertemuan Second APEC Senior Level Consultation on Agriculture and Food Security pada tanggal 13 Agustus 2014 dan rangkaian Pertemuan PPFS pada tanggal 14-16 Agustus 2014 yang terdiri dari Pertemuan High Level Dialogue Conference, Pertemuan Pleno PPFS serta Pameran APEC Food Technology, Facility and Resource Exhibition di Beijing bersamaan dengan rangkaian pertemuan SOM 3 APEC; serta (4) Pertemuan Second PPFS Management Council Meeting pada tanggal 17 September 2014 dan The Third APEC Ministerial Meeting on Food Security (MMFS 3) pada tanggal 18-19 September 2014 di Beijing. Jadwal lengkap kegiatan PPFS 2014 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Jadwal Rangkaian Kegiatan PPFS 2014 di Tiongkok

Kegiatan lain yang terkait dengan PPFS yang diselenggarakan di luar rangkaian kegiatan PPFS di Tiongkok adalah kegiatan pertemuan koordinasi PPFS pada bulan Maret dan Agustus 2014 di Bogor serta PPFS Rural Development Workshop pada bulan Juli 2014 di New Zealand.

Secara umum, beberapa hal yang dihasilkan dan disepakati sebagai capaian dari PPFS 2014 di Tiongkok adalah: (1) APEC Food Security Roadmap Towards 2020 (version 2014); (2) APEC Food Security Business Plan (2014-2020); (3) APEC Action Plan for Reducing Food Loss and Waste; (4) APEC Action Plan to Enhance Connectivity of APEC Food Standards and Safety Assurance; (5) PPFS Input for APEC Ministerial Meeting Joint Statement; dan (6) PPFS Input for APEC Leaders' Declaration.

Selain capaian tersebut, Ketua PPFS 2014 pada Pertemuan MC 2 di Beijing memberikan rekomendasi kegiatan PPFS 2015 kepada Filipina sebagai tuan rumah dan Ketua PPFS 2015 sebagai berikut:

- 1) Promote the implementation of the APEC Food Security Roadmap towards 2020 (version 2014), APEC Food Security Business Plan (2014-2020), APEC Action Plan for Reducing Food Loss and Waste, Action Plan to Enhance Connectivity of APEC Food Standards and Safety Assurance
 - a. Welcome to make efforts to put forward the activities listed in the Compilation of Working Groups' Proposed Activities (Version 2014) of the Roadmap.

- b. Welcome to continue and support the Strengthening Public-Private Partnership to Reduce Food Losses in the Supply Chain led by Chinese Taipei taking place in the Philippines.
 - c. Welcome to continue and support the Survey on Innovative Technology and Best Practices to Reduce Food Loss led by the U.S.
 - d. Welcome and support APEC PPFS 2015 Conference on Corn, Wheat and Rice Standards and Safety Assurance proposed by China, the U.S., New Zealand, Australia, and the Philippines to be held in the Philippines. It is expected to work corporately with FSCF in the conference.
 - e. Welcome to continue and support the role of PPFS Working Groups in achieving food security in the region.
 - f. Strengthen cooperation and exchanges with the APEC Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG), Food Safety Cooperation Forum (FSCF) and Oceans and Fisheries Working Group (OFWG) to jointly improve regional food security.
- 2) Leverage the comparative strength of each economy, boost inter-regional cooperation on food security in the following areas: (a) Promote policy communication on food security; (b) Strive to reduce food loss and waste; (c) Facilitate agricultural and food trade; (d) Improve food safety and nutrition; (e) Improve farmers and small holders' income and welfare; (f) Increase connectivity of food security partnership
- 3) Further arouse initiatives of private sectors' participation in promoting APEC food security activities

Berdasarkan hasil capaian PPFS 2014, rencana tindak lanjut serta posisi PPFS Indonesia pada tahun 2015 adalah:

- 1) Tetap menjunjung hasil kesepakatan Bogors Goals dan berpegang pada prinsip APEC yang bersifat sukarela, tidak mengikat, konsensus, unilateral dan differentiated time-frame
- 2) Mengawal hasil-hasil APEC 2013, khususnya: (a) Butir 10.e APEC Leaders' Declaration untuk meng-explore trade in products that contribute to sustainable and inclusive growth through rural development and poverty alleviation; dan (b) Butir 23 yang menyebutkan: we instructed officials to continue to ensure that our regional economy is resilient, that our growth is inclusive, that our economies become ever more

connected and that our people share equitable benefit from our secure and sustainable growth (RICES)

- 3) Tetap membawa isu “small farmers” dalam mainstream PPFS, yang bukan hanya kepentingan Indonesia, tetapi juga kepentingan pangan dan pertanian secara umum, sehingga arus investasi dan perdagangan global tidak memberikan dampak negatif kepada para petani kecil.
- 4) Mendukung perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka serta mendorong partisipasi aktif pihak swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Asia Pasifik
- 5) Indonesia menyatakan perlunya perlakuan yang sama untuk semua komoditi pangan, termasuk vegetable oil (minyak nabati). Untuk memberikan perlakuan yang sama tersebut, diperlukan pedoman berkenaan dengan pendekatan keberlanjutan (sustainability) terhadap semua komoditas pangan, termasuk vegetable oil. Untuk itu, Indonesia seyogyanya mempelajari dan bekerjasama dengan lembaga yang telah menyusun prosedur serupa, seperti EU atau FAO, untuk merumuskan sistem pangan dan pertanian berkelanjutan (food and agriculture sustainability system) yang sesuai dengan kepentingan Indonesia.
- 6) Indonesia atas dukungan Filipina dan AS telah berhasil memasukkan kepentingan kemaritiman (Mainstreaming Ocean and Related Issues) dalam Beijing Declaration. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dalam hal perikanan dan kemaritiman dalam hubungannya dengan peningkatan ketahanan pangan

3. Pemantapan Metodologi Pemantauan Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan WFP telah melakukan pengumpulan data Ketahanan Pangan dan Gizi di Tingkat Rumah Tangga pada 7 periode yang dimulai pada Tahun 2009 – 2011 di 20 Kabupaten pada 4 provinsi yaitu provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam hal monitoring, analisis, dan pelaporan tentang ketahanan pangan dan gizi serta perencanaan penanganan untuk terbentuknya sistem peringatan dini dan penanganan yang sesuai dan tepat waktu. Namun dari hasil analisis monitoring ketahanan pangan di tingkat rumah tangga di 4 provinsi tersebut belum mendapatkan hasil yang optimal, ~~diantaranya disebabkan metodologi yang digunakan belum sempurna seperti jumlah~~

sampel yang terlalu sedikit dan belum tepatnya penetapan periode pengambilan data, oleh sebab itu, perlu dilakukan penyempurnaan metodologi agar dapat dianalisis sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan dan keterjangkauan terhadap pangan di tingkat rumah tangga, serta peran modal sosial dan pemberdayaan kelembagaan lokal dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a) Pelaksanaan Uji Validitas Pemantapan Metodologi Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga

1) Penentuan Lokasi Uji Validitas

Kabupaten Cirebon dipilih sebagai lokasi uji validitas pemantapan metodologi pemantauan ketahanan pangan tingkat rumah tangga karena berdasarkan hasil analisis SKPG pada bulan Juni 2014 memiliki 3 (tiga) kategori yaitu 1 (aman), 2 (waspada), dan 3 (rawan). Berdasarkan hasil analisis ini, dipilih 3 desa yaitu Kecamatan Dukupuntang yang mewakili daerah Aman, Kecamatan Arjawinangun yang mewakili daerah waspada, serta Kecamatan Kapetakan yang mewakili daerah rawan pangan.

2) Penentuan Sampel

Jumlah sampel yang diambil untuk uji validitas pemantapan metodologi pemantauan ketahanan pangan tingkat rumah tangga adalah sebesar 252 responden. Jumlah ini ditentukan dengan rumus di bawah ini dan dengan antisipasi respon rate sebesar 10% :

$$n = \frac{Z^2_{1-\alpha/2} PQ}{d^2}$$

Ket :

n = Jumlah Sampel Minimal

$Z^2_{1-\alpha/2} = (1,962)^2$

P = Proporsi Keluarga Pra Sejahtera + Sejahtera I

d = margin of eror 5%

3) Pelaksanaan uji validitas:

Uji validitas dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

- (1) Tahap 1 : mengidentifikasi calon responden dan menentukan desa yang akan dipilih. Berdasarkan diskusi di lapangan, terpilih desa Kertasura yang mewakili perkotaan dan desa Bungko yang mewakili pedesaan dari kecamatan Kapetakan. Desa Jungjang mewakili perkotaan dan desa Bulak yang mewakili pedesaan dari Kecamatan Arjawinangun. Serta dari kecamatan Dukupuntang terpilih Desa Sindangjawa yang mewakili perkotaan dan Desa Cipanas yang mewakili pedesaan. Selanjutnya dilakukan pemilihan rumah tangga yang akan dijadikan responden berdasarkan data pra sejahtera dan sejahtera I dari masing-masing desa.
- (2) Tahap 2 : Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung oleh staf Badan Ketahanan Pangan dan Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS. Data yang dikumpulkan adalah komposisi anggota rumah tangga; pendidikan, mata pencaharian, tanaman pangan, peternakan dan aset lainnya; sumber pendapatan tunai; konsumsi makanan; pengeluaran; kesulitan dan strategi dalam menghadapi masalah; dan bantuan formal.

4) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan microsoft excel. Indikator yang digunakan adalah pengeluaran perkapita perbulan, distribusi pengeluaran untuk pangan serta skor konsumsi pangan. Situasi ketahanan pangan diperoleh dengan mentabulasi silangkan indikator-indikator tersebut. Kelompok pengeluaran perkapita perbulan dicrosstabulasikan dengan kelompok pengeluaran untuk pangan sehingga diperoleh kelompok akses pangan. Kelompok akses pangan dicrosstabulasikan dengan kelompok konsumsi pangan sehingga diperoleh indikator komposit ketahanan pangan (rawan, rentan dan tahan pangan).

5) Hasil dan Analisis Data

- Hampir seluruh responden (97,22%) di tiga kecamatan, skor konsumsinya tinggi (dilihat dari kualitas pangan yang dikonsumsi);
- Proporsi rumahtangga rawan pangan di daerah pedesaan dan perkotaan hampir sama banyak;
- Rumahtangga yang rentan dan rawan pangan umumnya rumahtangga yang sumber pendapatannya berasal dari pertanian, seperti buruh pertanian,

buruh non pertanian tidak terlatih, penjual hasil pertanian, penjual hasil perkebunan, penjual sayur dan buah, tergantung pada kiriman;

- Dari hasil korelasi SPSS, komponen modal sosial tidak berhubungan signifikan dengan ketahanan pangan rumah tangga;
- Modal sosial dapat dikembangkan dan dioptimalkan di kab. Cirebon adalah dalam bentuk kelembagaan-kelembagaan sosial di tingkat komunitas yang dapat menguatkan ketahanan pangan pada rumah tangga dengan mendasarkan pada etika (bounded solidarity) yang telah ada antar rumahtangga;
- Selain kekuatan ekonomi yang bekerja dalam menentukan ketahanan pangan rumahtangga miskin di Kab. Cirebon terdapat potensi-potensi diluar kemampuan ekonomi rumahtangga yang membantu rumah tangga tetap tahan pangan. Potensi tersebut adalah dalam bentuk modal sosial. Dari hasil survei menunjukkan bahwa rumah tangga yang tahan pangan adalah rumah tangga yang mempunyai modal sosial berupa kepercayaan, yang lebih tinggi dalam menjalin hubungan tanpa rasa saling curiga;
- Strategi koping yang sering dilakukan adalah mencari pekerjaan tambahan, kerja lembur, mengurangi jajan, membeli makanan secara kredit atau berhutang, membeli makanan yang lebih murah. Rumahtangga yang terlibat sebagai buruh non pertanian tidak terlatih, menjual sayuran dan buah-buahan, menjual hasil pertanian yang berjuang paling keras.

b) Pertemuan Pemantapan Metodologi Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga

- 1) Pertemuan Pemantapan Metodologi Pemantauan Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 Desember 2014 di Komplek Tirta PPMKP-Ciawi, Bogor. Peserta yang hadir dalam pertemuan ini sebanyak 70 orang yang menangani kegiatan akses pangan baik di provinsi atau kabupaten yang berasal dari 22 provinsi di Indonesia.
- 2) Tujuan pertemuan pemantapan metodologi pemantauan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah memperoleh masukan-masukan terkait dengan pemantapan metodologi pemantauan ketahanan pangan rumah tangga.

3) Materi dan Narasumber pada pertemuan ini yaitu:

- Pengarahan dan pembukaan dari Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- Analisis Akses Melalui Indikator Output : Konsumsi Kualitatif oleh Dr. Ir. Ikeu Tanziha, Msi
- Pemaparan hasil analisis akses pangan dari aspek sosial oleh Ir. Idawati Mursidah, M.Si.
- Pemaparan hasil analisis pemantapan Metodologi Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga oleh Ir. Ali Marsaban, M.Si
- Pengalaman pelaksanaan SKPG Plus Tahun 2009 – 2010 oleh Dedi Junadi (WFP)
- Pemantapan Metodologi Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga oleh Tim BKP.

4) Berdasarkan pemaparan dari narasumber dan diskusi, hasil pertemuan pemantapan Metodologi Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga sebagai berikut:

- Terdapat beberapa masukan untuk perbaikan indikator dalam kuesioner, antara lain seperti bahan pangan pokok jangan hanya beras, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar saja namun juga dapat dimasukkan makanan pokok lain seperti sagu.
- Peserta memahami hasil dan instrumen metodologi pemantauan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, namun masih perlu pendalaman materi lebih lanjut.
- Provinsi diharapkan dapat mengalokasikan dana APBD untuk mengaplikasikan kegiatan ini pada tahun 2015.
- Pusat memfasilitasi dana untuk kegiatan akses pangan melalui dana dekonsentrasi yang terdapat pada payung kegiatan Analisis Ketersediaan dan Akses Pangan, namun nilainya kecil.

4. Dukungan Instansi Lain

Pada tahun 2014 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mendapatkan dukungan dari beberapa instansi terkait antara lain :

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bank Indonesia, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BPPN), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan World Food Programme (WFP). Dukungan yang diberikan berupa penyediaan data yang digunakan dalam analisis yang terkait kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan selama tahun 2014 telah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yang tampak dari hasil pengukuran kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan, yang ditetapkan melalui 5 indikator berikut:

1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (regular dan kawasan) di 798 desa dengan capaian di 798 desa atau 100 persen;
2. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG di 455 lokasi dilaksanakan dengan capaian 455 lokasi atau 100 persen;
3. Jumlah hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi, dengan capaian 15 laporan atau 100 persen;
4. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan 36 laporan mencapai 100 persen.
5. Jumlah laporan hasil penguatan kapasitas aparat dan masyarakat mencapai 7 laporan mencapai 100 persen.

Selain melakukan kegiatan diatas, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan juga melakukan kegiatan lain untuk menunjang sasaran strategis yaitu pemanfaatan dana hibah AGFUND, PPFS-APEC dan pemantapan metodologi pemantauan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 83.318.628.000,- dan telah terealisasi Rp. 77.149.787.729,- atau 92,60 persen, yang dialokasikan pada di 9 kegiatan yang meliputi : Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Akses Pangan, Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) dan SKPG, Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), Analisis Situasi Akses Pangan, Monitoring Akses Pangan di Tingkat Penggilingan, Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan, Apresiasi SKPG dan Peningkatan Kapasitas Petani.

4.2 Saran

1. Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Perlunya peningkatan sosialisasi kegiatan Pusat ke daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusat dan Daerah;
4. Perlunya dukungan anggaran di Pusat dan Daerah.